

Indigenous Knowledge dan Pembangunan

Pembicara: Theofransus Litaay, S.H., LL.M.

Tanggal 28 Maret 2008.

Tempat: Ruang rapat Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia
Universitas Kristen Satya Wacana

Susunan Acara:

I. Pengantar moderator: Dr. Ferry Karwur.

Menjelaskan tentang signifikansi masalah yang akan didiskusikan hari ini dan persoalan-persoalan yang perlu didekati melalui penguatan pengetahuan asli masyarakat.

II. Presentasi Pembicara: Theofransus Litaay, S.H., LL.M..

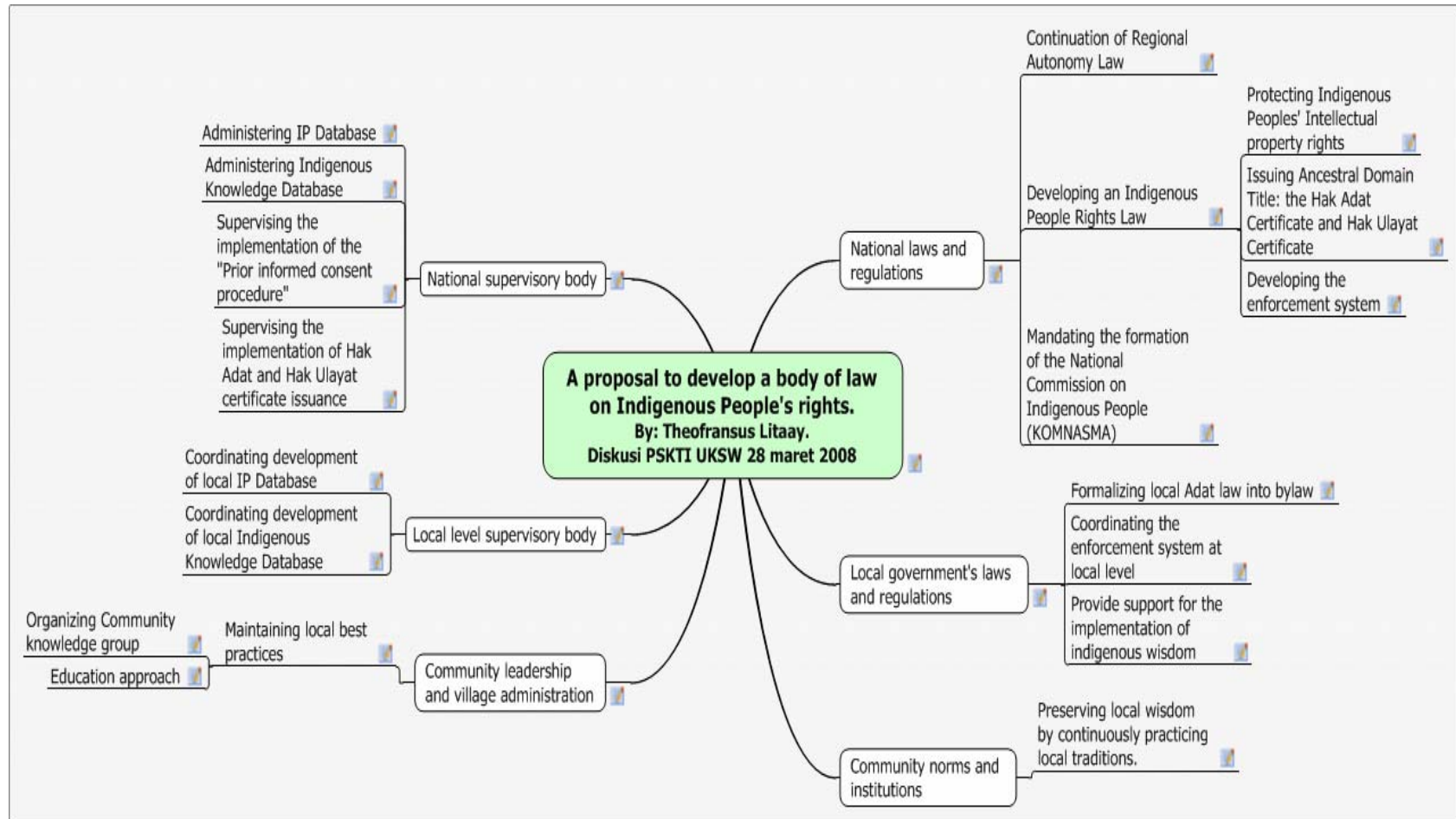
III. Diskusi.

Lihat paper, materi presentasi dan prosiding diskusi

IV. Penutup.

V. Presentasi.

Kerangka Pemikiran:



Latar Belakang Pemikiran:

[Dari draft Bab 5 buku “Biosecurity and Indigenous Knowledge”, akan diterbitkan oleh PSKTI UKSW, PPS-MB UKSW, BaKTI, CRC NPB dan CDU.]

KEMENDESAKAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA

Theofransus Litaay.

Pendahuluan

Banyak provinsi di Indonesia adalah tempat yang memiliki wilayah hutan yang masih cukup alami. Wilayah hutan adalah sebuah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat tanpa perlu untuk merusaknya. Kekayaan semacam ini dikenal dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

Keanekaragaman hayati wilayah hutan di Indonesia pada dasarnya selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya untuk berbagai keperluan hidup mereka, mulai dari kebutuhan pangan sampai dengan obat-obatan tradisional.

Biopiracy

Berbagai produk pangan maupun obat-obatan tradisional itu merupakan hasil olahan dan pengetahuan tradisional. Produk semacam ini tidak bisa dianggap enteng, karena seperti yang sudah terjadi di berbagai negara, pengetahuan tradisional ini biasanya menjadi dasar untuk produk pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan besar.

Perusahaan besar ini biasanya adalah trans-national corporation (TNC) atau perusahaan multinasional dari negara industri maju yang beroperasi dalam skala global. Mereka akan mengambil produk tradisional, diteliti melalui kegiatan riset dan pengembangan, kemudian menghasilkan produk pengembangan

dengan kemasan baru, yang mereka sebut sebagai produk baru. Misalnya dalam bentuk obat-obatan modern.

Obat yang “baru ditemukan” ini akan dimohonkan pendaftaran hak paten-nya dan diklaim sebagai milik perusahaan multinasional tersebut. Perusahaan multinasional mengklaim dirinya sebagai inventor (penemu). Dalam keadaan seperti ini, sejarah asal usul lahirnya produk tersebut sama sekali menghapus peran masyarakat tradisional sebagai inventor yang pertama.

Padahal, hak paten tidak bisa diberikan kepada perusahaan multinasional jika sebuah penemuan dapat dibuktikan telah pernah ada sebelumnya (dalam dunia hak paten dikenal sebagai syarat *prior art*). Tindakan mengklaim sumberdaya hayati olahan masyarakat oleh pihak yang tidak berhak dikenal sebagai *biopiracy* atau tindakan pembajakan kekayaan hayati (membajak pengetahuan tradisional atas sumberdaya hayati).

Biopiracy merujuk kepada penggunaan produk pengetahuan biomedis tradisional melalui paten oleh pihak asing tanpa pembayaran kompensasi apapun [Wikipedia]. Kasus yang terkenal adalah kasus obat tradisional dari jenis bunga *Rosy Periwinkle*. Bunga ini adalah tanaman asli Madagaskar, penelitian terhadap tanaman ini menemukan berbagai kandungan kimia aktif secara biologis termasuk untuk obat kanker bernama *Vincristine*.

Vincristine sangat efektif dalam mengobati kanker pada anak-anak. Sehingga dapat diperkirakan bahwa bahan ini akan menjadi obat yang sangat laku dan menguntungkan. *Vincristine* kemudian dipatenkan oleh perusahaan dari Amerika Serikat dan diketahui bahwa negara asal obat ini tidak memperoleh pembayaran apapun.

Kasus lainnya adalah kasus pohon Neem (*Neem tree*). Pohon Neem (*azadirachta indica*) adalah pohon yang tumbuh di berbagai tempat di India. Penduduk pedesaan di India sudah terbiasa memanfaatkannya pohon ini sebagai sumber obat-obatan tradisional. Kemudian pada tahun 1995, Departemen Pertanian AS dan sebuah perusahaan farmasi menerima hak paten mengenai teknik mengekstrak bahan anti jamur dari pohon Neem. Hal ini memperoleh perhatian dari media massa di India yang kemudian mendorong pemerintah India

mengambil langkah hukum sehingga paten tersebut kemudian dibatalkan pada tahun 2005.

Dalam gambaran kedua kasus di atas, nampak jelas bahwa *Biopiracy* juga berkaitan dengan tidak seimbangnya hubungan antara negara kaya dan negara miskin, dimana pemilik kekayaan hayati adalah negara miskin sedangkan yang memperoleh keuntungan darinya adalah negara-negara kaya.

Ukuran yang digunakan oleh perusahaan atau pemerintah negara-negara maju adalah ukuran yang belum mampu dipenuhi oleh masyarakat di negara miskin. Sebagai contoh, pada waktu pemerintah India memprotes pemberian hak paten dalam kasus pohon Neem, perusahaan farmasi di Amerika berpendapat bahwa hak paten dapat diperolehnya karena obat tradisional para petani di India tidak pernah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah sehingga orang India tidak dapat mengklaim sebagai penemu pertama.

Kasus semacam ini bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia, atau bahkan mungkin sudah terjadi tanpa sepengetahuan kita. Selama ini berbagai ekspedisi masuk keluar hutan di Indonesia tanpa terkontrol tujuannya, mungkin saja mereka terkontrol secara imigrasi dan hukum tetapi tidak terkontrol dalam soal keanekaragaman hayati. Terlebih lagi dengan lemahnya peran lembaga karantina dalam melakukan pencegahan terhadap keluarnya sumber daya hayati. Selain itu, kontrol terhadap kegiatan penelitian selama ini dilakukan oleh LIPI yang tentunya tidak memiliki kewenangan penegakan hukum dan yang pendekatannya bersifat administratif (mengandalkan keterangan peneliti asing untuk melaporkan secara sukarela).

Perlindungan yang dibutuhkan

Pemerintah Indonesia perlu lebih memberikan perhatian terhadap masalah seperti ini. Karena selain untuk mencegah “pencurian” pengetahuan tradisional, juga sangat penting untuk menarik manfaat dari kekayaan hayati tanpa perlu merusak alam.

Kekayaan ekonomi dapat diperoleh dari pengusahaan sumberdaya hayati secara tepat. Dalam hal ini komunitas tradisional harus ditempatkan dalam posisi

sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional dan sumberdaya hayati yang ada untuk melindungi kepentingan mereka. Pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator yang akan menikmati manfaat dari pajak terhadap perusahaan sumberdaya hayati.

Jika ada pihak asing yang hendak mengembangkan pengetahuan tradisional, maka pihak asing tersebut harus diwajibkan untuk melakukan kontrak dengan pemerintah setempat atau masyarakat setempat. Hasil yang diperoleh dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah setempat atau kepentingan bersama karena pengetahuan tradisional merupakan milik umum (*public goods*).

Dasar dari kebijakan semacam di atas dapat ditemukan di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* 1993 (CBD) dimana Indonesia menjadi anggotanya. CBD telah menegaskan hak-hak negara pemilik sumberdaya untuk mengawasi akses atas sumberdaya hayati yang dimilikinya. Pasal 15 CBD mengakui hak pemerintah untuk mengatur akses kepada sumberdaya genetik di dalam wilayah negara, sedangkan Pasal 8(j) mengakui hak-hak dari komunitas asli dan lokal terhadap pengetahuan tradisional, inovasi, dan praktek-praktek mereka.

Salah satu tujuan CBD adalah memampukan negara yang kurang berkembang untuk menerima manfaat dari pengetahuan dan sumberdaya tradisional mereka. Menurut aturan-aturan CBD, pihak yang membutuhkan informasi (pihak *bioprospector*) perlu memperoleh persetujuan (*informed consent*) untuk mengakses suatu sumberdaya, dan harus membagi manfaatnya dengan negara pemilik sumberdaya.

Untuk melaksanakannya, perlu disusun ketentuan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Bahkan jika belum disusun di tingkat nasional, maka bisa didahului dengan peraturan daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Tentunya hal ini merupakan salah satu bidang yang merupakan perlindungan kekhasan lokal sehingga menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya.

Pendekatan lainnya adalah untuk mencegah pengajuan hak paten secara sepihak oleh pihak asing. Untuk itu, dapat diambil contoh yang telah dilakukan di

India, dimana pemerintah India membuat *database* terhadap semua informasi obat-obatan tradisional India (bahkan yang telah berabad-abad usianya) dan memuatnya di internet. Sehingga jika salah satu perusahaan mengajukan hak paten dan kantor pendaftaran paten memeriksa informasi melalui internet maka bisa ditemukan bahwa telah ada penemuan yang serupa pada waktu sebelumnya.

Pemerintah Indonesia belum pernah melakukannya. Meskipun langkah kearah itu sebenarnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan informasi yang pernah disusun. Beberapa buku pernah diterbitkan dengan menyediakan informasi mengenai teknologi obat-obatan tradisional, namun tujuan penerbitannya tidak terkait dengan informasi hak kekayaan tradisional, karena lebih terkait dengan penyediaan informasi wisata budaya dan industri wisata. Penerbitan semacam itu bisa diperluas tujuannya yang terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional.

Buku semacam ini bisa menjadi awal bagi pembangunan *database* yang lebih lengkap, dan tujuannya harus bukan untuk informasi wisata, tetapi juga sebagai informasi pengetahuan sehingga bisa menjadi rujukan berbagai jurnal ilmu pengetahuan. Jika informasi semacam itu dimuat ke internet, maka akan terpublikasi secara global dan dapat diakses oleh berbagai kantor pendaftaran paten di dunia. Sehingga pemerintah juga bisa mengawasi kemungkinan pendaftaran paten oleh pihak asing yang tidak berhak terhadap pengetahuan tradisional dari sumberdaya hayati. *Database* itu sendiri perlu dilindungi dengan proteksi hak cipta sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya manfaat kepada komunitas. Dengan demikian diharapkan bahwa kita bisa mengambil manfaat dari globalisasi informasi, sekaligus sebagai produsen informasi. Tidak sekedar menjadi penonton.

Namun satu hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa pendekatan hak kekayaan intelektual saat ini – sama halnya dengan pendekatan hak atas tanah – mengakomodir sifat individualistik subyek hak terhadap obyek hak tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional perlu dibangun dalam perspektif komunal.

Selain itu pemanfaatan informasi oleh pihak yang berkepentingan bisa dilakukan dengan ikatan kontrak tertentu, sehingga bila terjadi wanprestasi maka bisa ditegakkan di depan pengadilan.

Dengan adanya hak khusus tersebut maka pengetahuan tradisional dapat dikontrol, dikembangkan, dan dilindungi, termasuk sumberdaya genetika dan manusia, benih, termasuk produk turunan dari sumberdaya ini seperti obat tradisional dan praktek kesehatan, tanaman obat, pengetahuan flora dan fauna, tradisi tutur, sastra, desain, dan seni pertunjukan.

Indonesia bisa belajar dari negara lain, seperti misalnya Filipina, yang telah memberikan hak secara formal kepada tanah pusaka masyarakat (*ancestral domain land*), yang dalam UU Pokok Agraria juga disinggung tetapi tidak kunjung diatur hingga saat ini. Perlindungan pengetahuan tradisional bisa dikaitkan dengan pendekatan hak kewilayahan semacam ini, dimana di dalam wilayah yang dibatasi dengan hak-hak tradisional berlaku syarat bahwa pihak lain yang hendak mengakses sumberdaya di dalam wilayah tersebut (khususnya sumberdaya hayati dan genetika dan pengetahuan tradisional yang tidak terkait dengan konservasi, pemanfaatan ataupun penguatan) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari masyarakat dengan prosedur khusus yang diatur untuk itu (*free and prior informed consent*) dengan model yang dikembangkan berdasarkan hukum kebiasaan setempat.

Free and Prior Informed Consent berarti persetujuan dari seluruh anggota komunitas setempat untuk membuat keputusan berdasarkan praktek dan hukum kebiasaan mereka, bebas dari manipulasi eksternal, pemaksaan, dan diperoleh setelah mengungkapkan secara penuh maksud dan lingkup kegiatan, tentunya dilakukan dalam bahasa dan proses yang dipahami oleh komunitas.

Manfaat teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi semacam ini harus dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Jadi *database* yang disusun perlu melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangannya dan dikontrol lebih lanjut oleh masyarakat. Alasan dari catatan semacam ini adalah bahwa jika

komunitas tidak dilibatkan dan tidak diberdayakan dalam pengelolaannya maka teknologi semacam ini hanya akan menjadi alat yang justru melepaskan penguasaan / kontrol masyarakat terhadap kekayaannya [diskusi penulis dengan Michael Christie dalam workshop biosecurity, mei 2007 di Bali]. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh manfaat dari nilai tambah pengetahuan tradisional mereka dan pemberdayaannya.

Penelitian yang dilakukan Michael Christie terhadap suku aborigin Yolngu di Australia bahkan menunjukkan bahwa suku tersebut mampu memanfaatkan internet dan kemajuan teknologi (audiovisual) untuk menampilkan identitasnya budayanya secara lebih luas, tanpa terhambat oleh budaya tulisan yang pada masa lalu datang dari Barat dan yang telah menghambat ekspresi budaya mereka.

Michael Christie juga menunjukkan bahwa salah satu manfaat positif dari teknologi informasi adalah bisa menjadi media bagi seseorang untuk menampilkan secara bebas gagasan, seni, lagu-lagu, kisah-kisah dll. Dibalik produk-produk kebudayaan ini tersimpan kearifan lokal yang ramah terhadap lingkungan alamnya.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Christie melihat bahwa hal terpenting dari pemanfaatan teknologi informasi sekarang ini adalah pada tersedianya hubungan antara satu orang dengan orang lain melalui internet, sehingga terjadi pertemuan komunitas sebagaimana yang sering terjadi di desa-desa suku namun sekarang mengambil setting yang berbeda.

Pertanyaan lebih lanjut adalah siapakah yang harus melakukan semua agenda di atas? Jawabannya tidak lain dari sinergi yang positif antara pihak pemerintah serta perguruan tinggi dan masyarakat lokal.

Pengembangan gagasan dalam bidang Biosecurity dan Indigenous Knowledge:

Develop National Policy and Local Wisdom.

Theofransus Litaay, Satya Wacana Christian University, Salatiga, Indonesia.

According to FAO (2003), *Biosecurity* is related to the activities of securing food supplies, it is an integrated strategy and approach covering policy and regulation framework (including instruments and activities) which analyze and manage risks in the sectors of food safety, animal live and health, plant life and disease including related environmental risks. Biosecurity covers pest and disease input / introduction, animal disease and pests, zoonosis, introduction and release of Genetically Modified Organisms (GMO) with all of its products, and Invasive Alien Species introduction and management and its genotype. In Australia, this concepts means protecting the country from exotic pests and diseases through quarantine, surveillance and early detection measures (Andrew Leask, 2004).

There are three levels of institutional and policy approach regarding the issue of biosecurity, which are as follows (Kasumbogo Untung, 2007):

- International level.
 - o International policies in the form of conventions, agreement, etc which have been concluded by many international organizations especially FAO (*Food and Agriculture Organization*) in food and agricultural sector, WHO (*World Health Organization*) in health sector, UNEP (*United Nations for Environmental Protection*) in environmental sector.
 - o Various international agreement and provisions related to the rules of international trade which had been adopted by WTO (*World Trade Organization*).
 - o Consensus on the *Sanitary and Phytosanitary agreement (SPS agreement)* – WTO.
 - o In the biosecurity issue on food and agricultural products trade, should observes the *TBT agreement (Technical Barrier to Trade)* – WTO.
- National level.
 - o Policies on Quarantine.
 - Phytosanitary protection policy from predatory organism and animals (Law No. 16/1992 on Animal, Fish and Plant Quarantine).
 - Government Regulation on Plant Quarantine (Government regulation No. 14 / 2002).
 - There is no special regulation yet on Invasive Alien Species (IAS), for the time being ruled by the laws on Quarantine.
 - o Food Safety.
 - National policy on Food Safety in relation to was broadly provided by Law No. 7/1996 on Food. This law prohibits the

distribution of any food containing poisonous or hazardous material. The law also prohibits distribution of polluted food (biologically, physically, chemically) that over the allowed maximum level.

- Started 2003, Indonesian government formed the national authority to coordinated certification of food quality and safety which divided into three levels: PRIMA 3, PRIMA 2 and PRIMA 1.
- PRIMA 1 product would be allowed to enter European or US market since it is comply with EUREPGAP
- GMO Products.
 - Relevant national policy for the cross border GMO products are:
 - Law no. 5/1994 on Ratification of the UN Convention on Biodiversity.
 - Law no. 21/2004 on Ratification of Cartagena Protocol or Cartagena Protocol on Biosafety on the Convention on Biological Diversity.
 - Government Regulation no.21/2005 on Biosafety of GMO products.
 - Weaknesses: Lack of controlling system and weak law enforcement. Until now, Indonesia has not been able to fully comply and to utilize the benefits of various agreement and protocol regarding Biosecurity including Biosafety and Food safety, especially in limiting the influx of foreign agricultural products to enter and control the domestic market.
- Indigenous community.
 - Discussion regarding development of the role and contribution of Indigenous community has not been well developed.
 - The discussion especially on the issues of technology conservation, traditional wisdom and culture are relevant in connection with implementation of Global policy and National policy on Biodiversity, related to Article 1 CBD.
 - The role and contribution of the "modern-farmer" or the agribusiness farmer in the biosecurity policy implementation is very important farmers are the biggest primary producer for exported Indonesian agricultural products.
 - The farmers need to improve their knowledge and technology and also their management capability so that they can produce the products which meet the standard of quality and safety of the destination countries.

Problems faced in developing biosecurity in Indonesia (Kasumbogo Untung, 2007):

1. Weak political support toward *Biosecurity* program.

2. Strong sector-selfishness among the government bureaucrats and strong disciplinary-selfishness among the research institutes and the university researchers.
3. Lack of national coordinating body and authority in Biosecurity.
4. Lack of detail and integrated regulation.
5. Low quality of research labs and infrastructures
6. The researcher, field personnel in the village do not understand biosecurity concept and technology
7. Limited awareness and support from the stakeholders (including farmer and agriculture corporation) regarding the importance of biosecurity.

Research questions:

1. How to utilize the international instruments on biosecurity for the benefits of Indonesian agriculture development?
2. How to improve the level of Indonesian compliance to the international standards by developing sound policies in biosecurity?
3. How to protect and develop the traditional culture and wisdom to fill the gap in national biosecurity policy?

7. DISKUSI:

1. MANAF TUBAKA:

Saya saat ini juga melakukan penelitian di suku Naulu di pulau Seram, Maluku. Rencana penelitian Theo ingin mengangkat kekayaan masyarakat lokal. Ini merupakan hal yang baik. Namun bisa dibikin lebih "nakal" lagi, dengan membongkar sistem lama. Dari penelitian ini bisa menciptakan teori baru tentang bagaimana Indigenous People dicover oleh negara dengan pengetahuan modern dalam jaringan kapital yang mematkan. Contoh: paten tahu di Jepang. Obat-obatan tradisional dari cengkeh dan pala sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat tapi sayangnya dalam struktur pengetahuan modern produk-produk itu dianggap bukan pengetahuan. Salah satu hal yang mendesak adalah bagaimana institusi hukum memberikan hak itu, untuk itu harus masuk dari mana?

1.1 Theo Litaay:

Dalam pandangan saya kita bisa masuk dengan cara melanjutkan proses otonomi daerah kedalam struktur lokal. Ada beberapa daerah membuat peraturan daerah tentang desa-desa adat, seperti *negri* di Maluku dan *nagari* di Sumatera Barat. Otonomi daerah sekarang belum lengkap, karena masih tanggung, berbeda dengan keadaan di negara tetangga seperti Filipina yang sudah memberikan pengakuan kepada indigenous people melalui Indigenous People's Rights Act (IPRA) dan disupervisi oleh komisi nasional yang bernama National Commission on Indigenous People (NCIP). Nah, proses otonomi daerah di Indonesia harus sampai pada taraf itu. Dalam diskusi lalu waktu pak lan di sini, ada rekan-rekan yang menyinggung tentang forum Musrenbang yang dimaksudkan sebagai forum penyaluran aspirasi dari bawah tapi terancam

menjadi forum kooptasi dari atas dengan proyek-proyek titipan dari atas. Mungkin kondisi ini termasuk masalah otonomi daerah yang belum lengkap karena kurang melibatkan masyarakat setempat.

1.1.1 Manaf Tubaka:

Masalahnya dalam proses ini masyarakatlah yang harus menjadi subyek, bukannya menjadi obyek. Pemahaman seperti inipun masih perlu dibangun dalam otonomi daerah.

1.1.2 Marthen Ndoen:

Dalam memahami permasalahan, saya kira kita harus membagi masalahnya antara masalah pemerintah pusat dan masalah di daerah. Pemerintah pusat lebih bermasalah karena kepentingannya berbeda, sedangkan pengalaman yang ada menunjukkan bahwa pemerintahan di daerah lebih paham. Jadi perlu dibedakan keduanya.

1.1.3 Manaf Tubaka:

Ada juga masalah pada tingkat pemerintah daerah. Sebagai contoh dalam kasus berbagai pemekaran di Indonesia Timur dapat terjadi juga karena kontribusi yang besar dari anak-anak adat juga. Tetapi pengetahuan pemerintah yang mengcover indigenous people ini yang belum memadai. Sehingga pemerintah daerah perlu dicover dalam rangka perubahan mindset-nya.

2. DANNY ZACHARIAS:

Debat dengan Michael Christie yang dijelaskan Theo tadi dipengaruhi oleh filsafat romantisme dan ketakutan akan kehilangan masyarakat lokal itu. Sedangkan mengenai komentar atas Musrenbang, kita sudah tahu tentang Musrenbang sebagai forum pembuatan keputusan, masalahnya apakah proses yang terjadi merupakan local decision making process atau community decision making process atau trickle down decision making process. Kita perlu lakukan penelitian lebih rinci, tidak bisa sekedar mengklaim kegagalan Musrenbang tanpa adanya penelitian yang mendalam. Forum Musrenbang menunjukkan adanya peran masyarakat yang cukup tinggi. Ini pengaruh pemikiran David Easton. Musrenbang perlu dipetakan. Partisipasi harus membawa serta local wisdom di dalamnya.

2.1 *Theo Litaay:*

Perlu dilihat apakah masyarakat memang dilibatkan secara partisipatif mengusulkan program yang diputuskan dalam forum Musrenbang.

2.2 *Murry Ratukore:*

Kebetulan saya memiliki pengalaman yang berkaitan dengan Musrenbang di Sabu dan Amarasi. Musrenbang memang melibatkan masyarakat. Tapi masalahnya kalau ada alokasi kegiatan dari atas. PPK juga diputuskan oleh masyarakat. Masalahnya adalah lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan fisik dan belum pada indigenous knowledge.

2.2.1 Danny Zacharias:

PPK memperkenalkan world wisdom, di dalamnya ada kesempatan kepada perempuan. Masyarakat yang menentukan. Dalam sistem PPK pemerintah tidak dominan karena legislatif

tidak berperan, sedangkan eksekutif berubah menjadi fungsi kontrol. Ini bagaikan state within the state, merupakan contoh yang baik dari kemandirian masyarakat.

2.2.2 Ferry Karwur:

Perlu proses-proses institusionalisasi kedalam legislasi.

3. DANNY ZACHARIAS:

Satu kelemahan dalam diskusi kita, adalah belum adanya definisi indigenous wisdom. Menurut saya, Indigenous Wisdom adalah hasil ramuan penemuan indigenous untuk dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Contoh orang Rote menggosok gigi memakai kulit pinang dan kayu *mayana*. Indigenous wisdom yang paling hebat adalah subak di Bali, yang sudah diakui dunia. Obat sakit gigi di Rote diambil dari sirih hutan, diambil dari *mamar* dimasak & minum. Jadi itu adalah temuan-temuan asli yang masih digunakan masyarakat yang kemungkinan sudah hilang karena introduksi modernisasi. Mengenai masalah perlindungan, pemanfaatan database tidak bermasalah. Dalam rangka otonomi daerah, legislasi mengenai itu dapat dimanfaatkan. Obat lokal di Rote dari tanaman lokal, pada waktu masuk rumah baru ada tanding pukul kaki dan kemudian diberi obat asli yang langsung menyembuhkan. Hak ulayat di laut juga perlu diberi perhatian.

3.1 Theo Litaay:

Dalam CBD: indigenous knowledge adalah pengetahuan indigenous people dan folklore.

4. RES FOBIA:

Dalam skema Theo tadi, ada problematika dalam community norms and institutions. Ketika dari local government diturunkan bisa merubah indigenous people menjadi peripheral people atau marginalized. Ini makin memperumit membawa community norms ke dalam community laws. Seperti di Sabu tadi, bukan hanya soal keluar dari segi fisik tapi juga soal menterjemahkan norma ke hukum.

Kesulitan lain adalah bagaimana melatih masyarakat memiliki ketrampilan memelihara perkembangan. Mereka tahu tapi tidak sungguh-sungguh karena mereka tidak berdaya. Di Musrenbang ada istilah 'musyawarah', yang justru melemahkan inisiasi karena gagasan dari atas melemahkan yang di bawah. Di PPK ada prinsip *for the sake of the poor*, tapi saat masuk musyawarah diinterpretasi bermacam-macam. Musyawarah mungkin tidak berhasil menjamin inisiasi murni.

Masalah perusahaan multi nasional (PMN). PMN punya masalah karena code of conduct yang secara hukum belum ada dan walaupun ada tidak diterapkan di bawah karena tidak ada penghormatan terhadap nilai-nilai indigenous. Indigenous people akan selalu tidak berdaya. Bahkan dalam hal bioterrorism act-

pun bisa menggambarkan betapa ketidakberdayaan masyarakat lokal mengelola pengetahuan mereka.

4.1 Theo Litaay:

Memang benar ada problematika dan polemik sebagaimana dikatakan pak Res. Dalam disertasi Agus Sardjono mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional juga disinggung tentang ketegangan tersebut. Ini yang masih akan didalami melalui penelitian saya nanti.

Mengenai perusahaan multi nasional, saat ini melalui UU Perseroan Terbatas yang baru (UU no. 40 tahun 2007) ada ketentuan mengenai CSR atau corporate social responsibility. Tidak heran banyak perusahaan yang sekarang mencari tenaga fasilitator pemberdayaan masyarakat dan itu sebabnya Edu Lontah sebagai moderator di milis PFPM sering mengirimkan iklan-iklan lowongan pekerjaan itu kepada para anggota milis PFPM. Tapi masalahnya UU no 40 tahun 2007 menempatkan CSR sebagai satu kewajiban hukum, padahal esensi CSR adalah filantropis dan kepedulian.

Selain itu, CSR ternyata hanya simbolik juga. Satu contoh adalah terhadap kasus Freeport di Papua. Pada waktu banyak orang mengkritik operasi Freeport di Papua, PT Freeport kemudian menyewa auditor internasional untuk melakukan sosial audit terhadap manfaat berbagai program community development yang dilakukan Freeport. Hasil audit tersebut justru menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, Freeport hanya seperti memberikan uang dan membangun fasilitas asrama bagi anak suku-suku setempat bisa bersekolah tetapi pengelolaannya tidak diawasi sehingga banyak fasilitas rusak dan tidak memadai sehingga justru merugikan persepsi orang terhadap Freeport. Tapi masalahnya ini juga persoalan peran pemerintah, kalau semua dibikin oleh korporasi maka apa peran pemerintah? Bagaimana dengan kedaulatan? Ini problematikanya.

4.1.1 Ferry Karwur:

Jadi disini CSR adalah sebagai gejala yuridis, bukan masalah menjadi jembatan antara korporasi dengan masyarakat.

4.1.2 Dharma Palekahelu:

Ada kesulitan pada perusahaan besar dalam memandang CRS, mereka lebih melihat konsep ini sebagai alat promosi perusahaan daripada sebagai tanggung jawab sosial. Ini pandangan yang saya dengar dari seorang rekan yang bekerja di perusahaan besar dan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana CSR tersebut mampu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil.

5. DHARMA PALEKAHELU:

Saya setuju dengan pak Danny tadi bahwa memang perlu dimulai dari definisi. Definisi perlu dilihat dari sisi proses, dimana kearifan lokal itu merupakan proses yang berulang-ulang untuk menjawab kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka sifatnya berubah-ubah dan tidak statis.

Soal Musrenbang, saya agak pesimis kalau mau digunakan untuk melestarikan kearifan lokal, karena ada faktor kesadaran dan belum ada upaya masyarakat untuk menstrukturisasi kearifan lokal. Dalam kasus Rote tadi lebih pada penjelasan teknisnya, tetapi dalam perspektif biologi bung Ferry bisa menjelaskan bahwa ada penjelasannya.

Contoh lain saya lihat di Sumba, ada ritual pengolahan tanah sebelum menanam kacang dimana petani mengunyah kacang lalu menyembur remah-remah kacang barulah bibitnya ditanam. Saat menyembur remah-remah kacang itu mereka mengeluarkan kata-kata adat. Orang yang hanya melihat dari luar akan menyangka bahwa kata-kata adat tadi akan menghalau penanaman bibit dari kegagalan, padahal ini sebenarnya merupakan strategi untuk mengalihkan semut agar memakan remah-remah dan tidak memakan bibit sehingga bibitnya bisa tumbuh. Jadi mungkin rasionalitas seperti ini yang belum disadari masyarakat. Point kita adalah menyadarkan, mengkoleksi, merasionalisasikan, lalu memilih forumnya.

Dari kasus PPK, soal kecenderungan bottom up, ini keraguannya karena PPK merupakan project dengan sistem kontrol yang kuat. Persoalannya, belum ada program replikasi pasca PPK. Jadi kalau nanti PPK dilaksanakan secara mandiri tanpa kontrol PMD dan Bank Dunia belum tentu bisa berjalan dengan baik.

Dalam dinamika otonomi daerah yang ada justru semakin top down. Hal ini sangat jelas kalau kita lihat pada waktu bupati mau naik, mereka akan didukung oleh pengusaha. Kemudian uang akan dibayar lewat penentuan proyek. Nah, bagaimana mau matching dengan kebutuhan masyarakat? perlu penelitian tentang pelaku pembagian-pembagian proyek itu.

5.1 Ferry Karwur:

Jadi masalahnya pada kesadaran legal dan kesadaran kognitif.

6. MANAF TUBAKA:

Kalau mengkaji indigenous knowledge dari kacamata sosiologi pengetahuan ada rasionalisasinya. Jadi yang perlu disadarkan adalah bagaimana menyadarkan masyarakatnya. Perspektif legalnya itu belum dibicarakan. Masalah empowering dan Musrenbang, kita memiliki paradigma yang berbeda karena menempatkan indigenous people sebagai orang yang bergantung. Dalam proses politik tadi, itu error-nya yang perlu dibalikkan.

6.1 Dharma Palekahelu:

Kalau mau kita mengembangkan pengetahuan lokal, rasional-rasionalnya datang dari masyarakat yang berbeda dari perguruan tinggi. Kalau mau menggunakan perangkat hukum, maka harus dirumuskan dengan rasional-rasional yang mana agar tidak terjadi kesalahan. Kasus di Gunung Mutis, batas pemahaman masyarakat dan pemerintah berbeda. Di desa yang saya teliti, ada batas-batas yang justru logikanya genealogis dan bukan geografis.

6.2 Theo Litaay:

Jika kita lihat dari berbagai best practices yang dikumpulkan oleh fact finding missions WIPO, memang menggambarkan adanya polemik rasionalitas itu. Dan dalam hal ini bukan saja masalah epistemologi tetapi juga praktis politik perdagangan global sangat berpengaruh.

6.3 Res Fobia:

Dalam kaitan dengan perdagangan global, ada contoh eksploitasi simbol-simbol budaya oleh kepentingan modal. Misalnya dalam budaya suku Indian Cherokee di Amerika, mereka memandang bahwa manusia tidak memiliki tanah tetapi tanahlah yang memiliki manusia. Pandangan ini diambil alih oleh perusahaan mobil dengan memasang merek Cherokee dan mengiklankan bahwa mobilnya “menyatu” dengan tanah sehingga merupakan mobil yang tangguh. Dalam contoh ini, pemilik modal mengambil keuntungan dari budaya lokal.

7. DANNY ZACHARIAS:

Dari percakapan kita nampak bahwa local wisdom daerah bisa dihancurkan oleh kapitalis. Kita tidak bicara tentang hukum adat perkawinan karena sudah dipertahankan masyarakat. Yang kita bicarakan adalah kalau budaya itu ada dan diambil oleh pihak luar untuk kepentingannya maka dibutuhkan perlindungan dan penegakan hukum. Jadi kapan hukum dibutuhkan? kalau culture ada tinggal bikin database. Sama dengan Cherokee, pulau Nuse tidak ada sertifikat karena tanah dianggap milik Tuhan. Budaya yang kuat cukup dilindungi habis-habisan.

7.1 Roy Siahainenia:

Pertanyaannya adalah bagaimana posisi Theo mengenai hal ini?

7.1.1 Theo Litaay:

Ini yang saya identifikasikan dalam bagian tentang pengakuan terhadap hak tanah adat [menunjuk pada skema], dimana tanah-tanah pusaka/ancestral domain itu memang diberikan kedudukan secara resmi dan didaftarkan atas nama komunitas (tanpa nama pribadi). Praktek ini bisa berjalan di Filipina. Saya kira ini letak perjuangannya dalam politik hukum nasional kita.

7.1.2 Ferry Karwur:

Ini berarti bahwa masalah yang akan diteliti ini bukan saja merupakan suatu persoalan hukum tetapi juga persoalan politik.

8. FEBRY BATARAGOA:

Kembali pada soal Musrenbang tadi. Bahasa Musrenbang itu ada peluang karena itu perlu ada hukumnya. Untuk itu perlu ada perda partisipasi. Apakah ada keinginan untuk memperjuangkannya oleh para dosen UKSW? Musrenbang itu ruang publik, masyarakat pintar kalau didukung oleh intelektualnya. Seperti kasus di Filipina yang saya dengar dari mas Nick.

8.1 Ferry Karwur:

Persoalan yang diangkat Febry itu kan di Salatiga saja bermasalah, bagaimana dengan remote area yang sulit tersentuh intelektualnya?

8.1.1 Theo Litaay:

Sulit menjelaskan keadaan di Papua sebelum melakukan penelitian. Tapi secara umum, masalahnya ada pada kapasitas institusi di daerah untuk mendayagunakan berbagai sumber

daya yang dimilikinya. Dibutuhkan pula kesadaran sosial dan komitmen sosial yang tinggi. Mengapa para intelektual di Filipina marak melakukan advokasi sosial? Karena memang dibangun melalui teologi sosial gereja Katolik yang sangat kuat. Dalam pengalaman di Ateneo de Manila University yang para mahasiswanya berasal dari the privileges tetapi mereka ikuti berbagai immersion program ke sektor-sektor komunitas dengan tingkat kemiskinan paling ekstrim, seperti yang pernah saya ikuti selama beberapa waktu di pulau Mindoro. Jadi memang beda ideologi sosialnya.

9. SAAM FREDY:

Saya setuju dengan pandangan Prof Satjipto Rahardjo bahwa kesulitan untuk menegakkan hukum di Indonesia adalah karena hukum kita sudah dikooptasi dengan pemikiran Barat seperti perdata dan pidana. Kenapa tidak mengembalikan masalah kepada tatanan masyarakat untuk meresponsnya sendiri, mirip legal pluralism selama tidak mengganggu grand norm dari negara.

9.1 *Theo Litaay:*

Masalah yang sama mengenai legal pluralism ini pernah kami temukan pada waktu saya bersama bung Roy Siahainenia melakukan penelitian tentang tanah di Timor-timur tahun 1998. Waktu itu konsultan kami adalah pak Danny Zacharias yang memang memilih legal pluralism sebagai pendekatan kami. Kami menemukan adanya tiga budaya hukum yang masih berpengaruh, yaitu hukum agraria Indonesia, hukum agraria peninggalan Portugal dan hukum agraria adat. Dalam dua hukum terakhir ada percampuran, sedangkan hukum agraria Indonesia waktu itu tidak mampu mengakomodir dua budaya hukum lainnya.

10. JOHAN TAMBOTOH:

Saya ingin komentar soal aspek IT karena tadi di singgung Theo soal database. Dalam minggu ini ada pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini katanya dekat dengan UU HAKI. Dalam kasus database di India tadi, bagaimana hubungannya dengan haki, apakah bisa diakui sebagai milik kita? Seperti dalam database LIPI ada alat teknologi tepat guna, sedangkan petani di Sragen juga menggunakan teknologi itu. Bagaimana indigenous knowledge bisa dikaitkan dengan HAKI dan UU ITE yang baru keluar? Dalam cerita diskusi dengan Michael Christie, persoalannya saya lihat bukan di teknologinya tapi di orangnya. Contoh: pembuatan blog, sudah dibikin tapi belum dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Ada tulisan membandingkan implementasi knowledge management di perusahaan dan di sosial atau non-perusahaan. Pemanfaatan di perusahaan jalan karena ada mekanisme yang jelas, sedangkan di ranah sosial belum ada mekanisme yang memperkuat.

10.1 *Theo Litaay:*

Hak atas database belum dielaborasi lebih jelas dalam UU Hak Cipta. Dibutuhkan pengaturan khusus, seperti halnya dengan database right yang dikenal di negara lain seperti di Uni Eropa.

10.2 Ferry Karwur:

Saya kira ada perbedaan antara ranah personal dan ranah publik. Masalah yang diangkat Johan soal mekanisme di korporasi itu kan masalah personal hubungan antara pegawai dengan perusahaan sedangkan yang kita diskusikan lebih bersifat publik. Masalah pengelolaan knowledge management di perusahaan itu bisa dibahas nanti sebagai topik diskusi terpisah oleh Johan, karena itu juga mungkin rencana penelitian dia

11. MARTHEN NDOEN:

Saya agak pesimis dengan perkembangan indigenous people di Indonesia, jika kita tidak sungguh sama sekali tentang sistem politik nasional. Meskipun kita bicara desentralisasi, tapi karena resentralisasi itu juga sedang kembali. Ini kalau negara bagian bisa, tapi dalam sistem kenegaraan kita sulit. Misalnya soal legal pluralism tadi, logika kapital akan against itu. Ini jadinya bukan saja perjuangan politik untuk meyakinkan pemerintah tapi juga modal, tapi jangan kita mundur. Paling tidak bisa melakukan pencerahan yang akan bermakna pada jangka panjang.

11.1 Manaf Tubaka:

Sebenarnya instrumen Dewan Perwakilan Daerah sebagai jembatan antara national laws dan local laws bisa membantu untuk membangun legislasi dari desa-desa. Mungkin pencerahan bisa melalui kerangka ini terlepas dari efektifitasnya.

11.2 Marthen Ndoen:

Masalahnya kalau di daerah diberikan permen modal asing lalu kita lewat.

11.3 Roy Siahainenia:

Kalau dalam kasus Papua itu bukan saja masalah bagaimana meyakinkan pemerintah tapi juga memang terjadi internasionalisasi isu Freeport.

12. MARTHEN NDOEN:

Dalam skema Theo, kekurangan yang masih nampak adalah belum menggambarkan aspek ekonomi.

12.1 Ferry Karwur:

Di CDU ada study yang dilakukan tentang masyarakat lokal yang memilih winning product yang merupakan keunggulan wilayah terkait.

8. Penutup

Diskusi diakhiri oleh Dr Ferry Karwur selaku moderator. Moderator memberikan catatan tentang hal-hal penting yang muncul dalam diskusi ini yang bersifat rekomendasi bagi penelitian lain oleh peneliti yang lain (misalnya dalam

penelitian tentang Musrenbang) dan masukan kepada Theo mengenai hal-hal yang perlu dipertajam dalam pelaksanaan penelitian nantinya (misalnya melihat proses yang terjadi tidak saja dari segi pembentukan kebijakan tetapi juga dari segi dinamika politik pusat dan daerah).

Daftar Nama Peserta Diskusi

- (1) A. Manaf Tubaka. PPs-SA. mtubaka@yahoo.com . 081343132388.
- (2) Theo Litaay. PSKTI. theolitaay@gmail.com . 08157749346.
- (3) Ferry Karwur. PSKTI. fkarwur@yahoo.com . 081325489390.
- (4) Dharma Palekahelu. PSKTI. dpalekahelu@yahoo.com . 081333697773.
- (5) Roy Siahainenia. PSKTI. roysiahainenia@yahoo.com . 08159920649.
- (6) Danny Zacharias. PSKTI. jdzacharias@yahoo.com . 081575220259.
- (7) Res Fobia. PSKTI. romasiienfo@yahoo.co.id . 08523207359.
- (8) Marthen Ndoen. PSKTI. mndoen@yahoo.com . 08122817151.
- (9) Johan Tambotoh. FTI. johan_tambotoh@yahoo.com . 081325379883.
- (10) George Banunaek. PSKTI. george.sala3@yahoo.com . 081575787328
- (11) Saam Fredy. Humas UKSW. fredy_saam@yahoo.com . 08157649795.
- (12) Edward Lontah. PSKTI/PFPM. elontah@msn.com . 08156627017.
- (13) Pieter Soegijono. PPS-S3-SP. pietersoegijono@yahoo.com. 081343004445.
- (14) Abd. Rahman Sely. PPs-SA. rahmansely@yahoo.com . 085243621034.
- (15) Geritz Febrianto B. Scientiarum. geritz2000@yahoo.com . 081325228726.
- (16) Nancy Margriet Marau. PPs-SP. nancy.marau@gmail.com . 085640033279.
- (17) Murry Ratukore. PPs-MSP. oscar_murry@yahoo.co.id . 081914339107.
- (18) Winarto. FE UKSW. winarto.zip@gmail.com . 08562744089.
- (19) Stevie Sahusilawane. PPS-MSP. laterdu@yahoo.com . 085233181979.

9. Komentar terhadap topik diskusi ini melalui email atau sms (sebelum dan sesudah diskusi).

9.1. Roy Siahainenia (PSKTI)

Dikirim melalui email tanggal 15 Maret 2008, jam 21:42:30 -0700:

Om Theo,

Usul ditambah kasus-kasus yang menarik Indonesia, terutama praktek-praktek menegakkan hukum adat baik pada sistem pemerintahan, sistem pemilikan tanah, sistem pola tanam, sistem tebas pilih di sektor kehutanan, dan ada banyak lagi. Dengan cara seperti ini, diskusi kita bisa bergerak pada dua aras: (1) paradigmatik, dan (2) empiris atau istilah bung Ferdy Rondonuwu adalah semacam analogi. Hal ini penting supaya kita juga dapat menggali dari teman-teman yang nantinya akan ikut diskusi, pengalaman-pengalaman yang peranh mereka alami.

Masukan lain, mungkin pendekatan lebih kepada data-data empiris dipertautkan dengan konsep-konsep seperti dalam outline yang disusun, untuk mempermudah kami memahami materi yang om Theo mau bawaikan. Dalam kaitan seperti ini, outline om Theo lebih menggunakan pendekatan "program" bukan pada "proses". Usul Roy bahasan kita lebih kepada "proses" terkait dengan bagaimana masyarakat membangun sistem hukum berdasarkan kearifan yang dimilikinya. Usulan ini muncul dari tanggapan Pak Willy terhadap makalah Piet Sugiyono; siapa dan untuk siapa. Pertanyaannya sangat kritis karena kalau kita mau bangun grand narrative hanya mengacu pada teori-teori besar, maka selamanya kita tidak akan menemukan hal-hal yang secara orisinil kita bisa perdebatkan.

Minta maaf kalau ada usul yang tidak berkenan, Selamat Bekerja Tuhan memberkati.

Roy.

9.2. Immanuel Djahi (IGGRD Jakarta):

Dikirim melalui email tanggal 17 Maret 2008, jam 2:23 PM:

Om Theo

Berikut ini ada beberapa materi tentang kearifan lokal.

Thanks.

Saturday, July 28, 2007

[Kearifan lokal : mutiara yang ditemukan kembali](#)

Oleh Yohanes Manhitu *

BELAKANGAN ini istilah "kearifan lokal" (local wisdom) mengemuka dan cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia. Bukan hanya di layar televisi, radio, melainkan juga dalam pidato dan bahkan dalam debat kusir di warung kopi kita mendengar istilah ini digunakan dengan bergairah, terlepas dari fakta apakah si pengguna benar-benar memahami makna di balik istilah keren tersebut. Tak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang muncul begitu banyak istilah 'mutakhir' yang digunakan dengan bangga tanpa peduli akan ketepatan maknanya, sesuai dengan konteks. Misalnya istilah "deportasi" dan "ekstradisi" yang seringkali digunakan secara serampangan. Tak kurang bijak bila acap kali, guna memastikan ketepatan arti kata yang digunakan dalam berkomunikasi, kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah dihasilkan dengan susah payah.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup (Pikiran Rakyat, 4 Oktober 2004). Misalnya ungkapan alon-alon waton kelakon (biar lambat asal tujuan tercapai) dalam budaya Jawa. Atau semboyan marsiadap ari (saling membantu dalam melakukan suatu pekerjaan) dalam budaya Batak.

Kembali ke alam

Kearifan lokal boleh jadi merupakan salah satu wujud nyata slogan "kembali ke alam" (back to nature) yang sering didengungkan di mana-mana. Mengamati istilah ini secara lebih saksama, secara kritis kita juga boleh berasumsi bahwa jika ada 'kearifan lokal', maka mungkin juga ada 'kearifan nasional' dan 'kearifan internasional'. Dan orang boleh dengan ironis bertanya mengapa justru di era globalisasi di mana dunia seakan-akan telah menjadi dusun global (global village) orang justru beramai-ramai kembali memperbincangkan hal-hal yang bercitra lokal. Apakah hal ini bukan suatu langkah mundur di era siber yang serba canggih ini? Apakah kaum cerdik pandai sudah jemu mengutak-atik konsep-konsep agung yang berlevel mondial? Atau apakah konsep-konsep tersebut sudah tidak sanggup lagi mengobati berbagai penyakit sosial zaman ini? Agaknya masih

ada sebaris panjang pertanyaan yang dapat kita ajukan sehubungan dengan munculnya "kampanye" kearifan lokal yang cukup gencar akhir-akhir ini. Sebagai masyarakat yang beradab tentu kita tahu bahwa kita memiliki kekayaan budaya, terlepas dari perbedaan istilah yang digunakan untuk menyebutnya. Mutiara-mutiara budaya itu berserakan dan tersebar luas dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan terutama ditemukan dalam kosakata bahasa daerah/ibu. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara yang khas dalam mengungkapkan kandungan kearifan lokalnya, yang mencerminkan cara pandangnya tentang dunia. Dalam kaitannya dengan hal ini, George Steiner, pakar sastra komparatif kampion, menyatakan, "Chaque langue humaine constitue une expérience, une perception, une construction intégrales du monde" (terjemahan bebas dari bahasa Prancis, Setiap bahasa manusia merupakan suatu pengalaman, persepsi, dan konstruksi integral tentang dunia; *Le Magazine littéraire*, Juni 2006: 41). Dalam bahasa Dawan (Uab Meto), untuk tidak menyebut seluruhnya, dikenal ungkapan tmeup onlê ate, tah onlê usif (bekerjalah kita seperti budak supaya makan seperti raja) yang penuh dengan ajakan tegas. Ungkapan yang senada mungkin juga dapat ditemukan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia dan benua lain. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian yang kurang lebih sepadan dengan ungkapan bahasa Dawan di atas. Ungkapan-ungkapan yang pendek dan sederhana, karena bersifat lokal, sangat menyentuh bagi masyarakat penutur bahasa tersebut. Kita boleh berharap banyak bahwa dengan diangkatnya kembali bentuk-bentuk kearifan lokal yang demikian kita mulai bercermin pada realitas di lingkungan hidup kita selama ini dan terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan yang konstruktif guna menghadapi tantangan global yang makin besar dan beragam.

Dengan berpegang teguh pada pesan ungkapan pendek di atas, misalnya, kita akan senantiasa sadar untuk tidak berperilaku instan dan harap gampang dalam mencapai sesuatu, baik kecil maupun besar. Ini berarti kita hanya layak memperoleh sesuatu bila kita sungguh-sungguh bekerja keras dan benar-benar pantas mendapatkannya. Tindak korupsi dan cara-cara tak jujur yang lain untuk memperoleh kekayaan instan seolah-olah hanya dengan berucap bim-sala-bim tentu saja tidak mencerminkan semangat ungkapan di atas. Dan dengan bekerja keras dan cerdas (bdk. dengan semangat kerja keras bangsa Jepang) kita dapat bersaing dan berjaya di era globalisasi yang penuh tuntutan mencemaskan.

Bersikap selektif dalam menerima nilai-nilai baru

Dewasa ini, dengan adanya arus informasi global yang sangat deras, terlalu banyak tawaran nilai yang datang dari segala penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Dan membangkitkan kembali kearifan lokal di setiap daerah di tanah air boleh jadi diartikan secara keliru sebagai gerakan membangun benteng yang tangguh guna menangkis serangan nilai-nilai asing yang merupakan produk globalisasi. Hal ini dapat menimbulkan sikap dan pendirian a priori yang mendorong kita untuk serta merta menolak segala bentuk pengaruh global, termasuk yang baik dan berguna bagi kemaslahatan bangsa dan negara kita. Sebagai solusi, kita perlu bersikap kompromistis, yaitu memandang promosi kearifan lokal dewasa ini sebagai upaya menciptakan saringan yang bagus bagi nilai-nilai asing tersebut. Dengan demikian, kita semua dituntut untuk bersikap semakin selektif dalam menanggapi kehadiran nilai-nilai impor dan bersama-sama terus-menerus memupuk kesadaran akan betapa pentingnya pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup, tradisi setempat, dan berbagai kekayaan budaya yang tak boleh sampai ditelan arus deras globalisasi.

Disadari ataupun tidak, bersama-sama dengan berlaksa manusia di planet ini kita sedang berada dalam gerbong kereta waktu yang terasa berjalan makin cepat. Kita memang perlu berubah, namun jangan sampai atas nama perubahan itu sendiri kita menjadi subjek yang buta bagi wujud perubahan yang memudahkan jati diri kita. Yang kiranya layak untuk direnungkan bersama adalah mencari format yang adaptif bagi pelestarian kearifan lokal yang kita miliki sebagai kekayaan budaya. Dalam arti, kearifan lokal, bersama-sama dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut, harus bisa turut melandasi perubahan (yang positif) itu sendiri. Dengan kata lain, kearifan lokal turut menjadi landasan perubahan global, paling kurang di lingkungan kita sendiri. 'Perkawinan' unsur-unsur inilah yang akan memungkinkan kita untuk terus maju tanpa merasa berdosa secara budaya.

Mewaspada paham-paham pada era globalisasi

Menurut hemat penulis – dalam kaitannya dengan kearifan lokal –, kapitalisme, materialisme, dan individualisme adalah isme-isme yang paling gencar menyerang kehidupan manusia di era globalisasi (bukan gombalisasi!) ini. Kapitalisme melebarkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Akibatnya, yang kaya makin kaya; yang miskin tambah miskin. Dan suatu bangsa besar yang berdaulat secara politis pun dapat bertekuk lutut kepada para pemodal raksasa tanpa mengindahkan nilai-nilai luhur bangsanya dan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Materialisme pada gilirannya menyebabkan manusia terpacu untuk terus-menerus mengumpulkan materi dan menempatkannya di peringkat teratas dalam pencapaiannya dengan mengesampingkan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat, misalnya kebiasaan hidup sederhana. Dan individualisme, yang sudah lama dikenal dan diterapkan di negara-negara Barat, pada era sekarang pengaruhnya sudah sangat terasa di negara kita, terutama di daerah perkotaan.

Pengaruh individualisme tersebut di atas masih jarang ditemukan di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di Yogyakarta, misalnya, terbukti bahwa semangat gotong-royong ini masih cukup kuat karena setelah terjadinya musibah letusan Gunung Merapi dan gempa bumi, kehidupan masyarakat dapat kembali normal berkat kearifan lokal yang masih terpelihara. Kita berharap agar hal yang terpuji ini dapat ditemukan juga di seluruh persada nusantara.

Manifestasi berwajah baru

Munculnya isu kearifan lokal yang seiring dengan bergulirnya otonomi daerah (otoda) tentu tidak diharapkan untuk mengobarkan spirit sukuisme. Justru sebaliknya patut dipandang sebagai manifestasi berwajah baru dari kebinekaan kita. Tak dapat dipungkiri bahwa kita memiliki ketunggalikaan yang kokoh di samping kebinekaan yang kaya.

Di era otoda ini, ketika banyak pihak tengah sibuk mencari model pembangunan daerah yang representatif dan mengharapakan pemerintah lokal yang sanggup merangkul segala lapisan masyarakat dan bersama-sama memelihara kekayaan budaya dan sumberdaya alam, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai salah satu sumber nilai-nilai yang luhur bagi maksud tersebut. Dengan kata lain, kearifan lokal bisa menjadi sumur yang tak kunjung kering di musim kemarau panjang nilai-nilai kebijaksanaan bagi perwujudan cita-cita pembangunan daerah yang seimbang, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Penangkal konflik-konflik intern

Di samping berfungsi sebagai penyaring bagi nilai-nilai berasal dari luar, kearifan lokal dapat juga digunakan untuk meredam gejolak-gejolak yang bersifat intern. Misalnya konflik masyarakat yang sesuku atau antarsuku. Upaya promosi nilai-nilai luhur dalam kebudayaan tertentu secara formal akan menimbulkan apresiasi dan rasa bangga terhadap nilai-nilai tersebut. Dengan demikian akan timbul semangat yang kuat untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat maun-alin (kakak-adik, bersaudara) yang cukup kental dalam masyarakat berbahasa Tetun, misalnya, bisa menjadi penangkal konflik intern (karena adanya rasa persaudaraan) hanya jika hal ini diarahkan untuk maksud positif dan tak ditunggangi kepentingan sepihak. Masih banyak ungkapan lain yang diharapkan dapat berfungsi efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan konflik intern. Ungkapan seperti nekaf mesê, ansaof mesê (sehati sejiwa) yang umum dikenal masyarakat penutur bahasa Dawan akan turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya semangat gotong-royong jika jiwa barisan kata-kata indah ini dapat diejawantahkan dengan tepat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulannya, kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan dipelihara dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif pedoman hidup manusia Indonesia dewasa ini dan dapat digunakan untuk menyaring nilai-nilai baru/asing agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Khalik, alam sekitar, dan sesamanya (tripita cipta karana). Dan sebagai bangsa yang besar pemilik dan pewaris sah kebudayaan yang adiluhung pula, bercermin pada kaca benggala kearifan para leluhur dapat menolong kita menemukan posisi yang kokoh di arena global ini.

Indigenous Knowledge for Development Results

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/EXTINDKNOWLEDGE/0,,menuPK:825562~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:825547,00.html>

This website opens a gateway to development approaches that rely on traditional knowledge systems to help achieve the Millennium Development Goals. The goal of the website is to (a) raise awareness among the development community of the role that community-based practices can play in enriching the development process; and (b) help development practitioners to mainstream indigenous/traditional knowledge into the activities of development partners and to optimize the benefits of development assistance, especially to the poor.

Strategies

These goals are being achieved through different strategies. These include: (a) dissemination: [a database](#) on indigenous/traditional knowledge and practices with nearly 300 entries and a series of monthly "[IK Notes](#)" which present in some detail, locally driven solutions to often complex issues; (b) learning: cross regional, peer-to-peer learning exchanges aimed at enhancing local capacity to identify and apply indigenous/traditional knowledge and practices; (c) mainstreaming the application of [IK in World Bank-supported projects](#) and [in national development programs](#); and (d) partnerships: brokering collaboration on IK issues between local practitioners, community-based organizations, governments, donors, and the global scientific community and other international organizations.



March 10, 2007

Kebudayaan Lokal, Multikultural, dan Politik Identitas dalam Releksi hubungan Antaretnis antara Kearifan Lokal dengan Warga Cina di Bali

Oleh

I wayan Ardika
Fakultas Sastra
Universitas Udayana

Pendahuluan

Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan (*rwa bhineda*), yang sering ditentukan oleh faktor ruang (*desa*), waktu (*kala*) dan kondisi riil di lapangan (*patra*). Konsep *desa*, *kala*, dan *patra* menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh kebudayaan luar. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa komunikasi dan interaksi antara kebudayaan Bali dan budaya luar seperti India (Hindu), Cina, dan Barat khususnya di bidang kesenian telah menimbulkan kreatifitas baru dalam seni rupa maupun seni pertunjukan. Tema-tema dalam seni lukis, seni rupa dan seni pertunjukkan banyak dipengaruhi oleh budaya India. Demikian pula budaya Cina dan Barat/Eropa memberi nuansa baru pada produk seni di Bali. Proses akulturasi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan adaptif khususnya dalam kesenian sehingga tetap mampu bertahan dan tidak kehilangan jati diri (Mantra 1996).

Kebudayaan Bali sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), hubungan sesama manusia (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*), yang tercermin dalam ajaran *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kesejahteraan). Apabila manusia mampu menjaga hubungan yang seimbang dan harmonis dengan ketiga aspek tersebut maka kesejahteraan akan terwujud.

Selain nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi, dalam kebudayaan Bali juga dikenal adanya konsep *tri semaya* yakni persepsi orang Bali terhadap waktu. Menurut orang Bali masa lalu (*athita*), masa kini (*anaghata*) dan masa yang akan datang (*warthamana*) merupakan suatu rangkaian waktu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kehidupan manusia pada saat ini ditentukan oleh hasil perbuatan di masa lalu, dan perbuatan saat ini juga menentukan kehidupan

di masa yang akan datang. Dalam ajaran hukum karma phala disebutkan tentang sebab-akibat dari suatu perbuatan, perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian pula sebaliknya, perbuatan yang buruk hasilnya juga buruk atau tidak baik bagi yang bersangkutan.

Kebudayaan Bali juga memiliki identitas yang jelas yaitu budaya ekspresif yang termanifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai-nilai dasar yang dominan seperti: nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni, dan nilai keseimbangan (Geriya 2000: 129). Kelima nilai dasar tersebut ditengarai mampu bertahan dan berlanjut menghadapi berbagai tantangan.

Ketahanan budaya Bali juga ditentukan oleh sistem sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk lembaga tradisional seperti banjar, desa adat, subak (organisasi pengairan), sekaa (perkumpulan), dan dadia (klen). Keterikatan orang Bali terhadap lembaga-lembaga tradisional tersebut baik secara sukarela maupun wajib, telah mampu berfungsi secara struktural bagi ketahanan budaya Bali. Menurut Geertz (1959) orang Bali sangat terikat oleh beberapa lembaga sosial seperti tersebut di atas. Lembaga tradisional seperti desa adat dianggap benteng terakhir dari keberlanjutan budaya Bali.

Namun demikian, perlu kiranya dipahami bahwa ketahanan kebudayaan Bali mempunyai kelemahan dari tiga aspek pokok yaitu ketahanan struktural, fungsional dan prososial (Geriya 2000:183). Ketahanan struktural secara fisik terkait dengan penguasaan tanah sebagai penyangga budaya, yang bukan saja berubah fungsi tetapi juga berubah penggunaannya. Kelemahan fungsional terkait dengan melemahnya fungsi bahasa, aksara dan sastra Bali sebagai unsur dan media kebudayaan. Kelemahan prososial realitas konflik yang berkembang dengan fenomena transformasi dengan ikatannya berupa fragmentasi dan disintegrasi.

Perubahan Kebudayaan Bali

Masyarakat dan kebudayaan Bali tidak luput dari perubahan di era globalisasi ini. Seperti dikatakan oleh Adrian Vickers (2002) bahwa orang Bali kini tengah mengalami suatu paradok yakni cenderung mengadopsi kebudayaan modern yang mendunia (kosmopolitan), namun di sisi lain juga sedang mengalami proses parokialisme atau kepucikan yang timbul karena fokus beralih pada lokalitas, khususnya kepada desa adat. Dengan kata lain bahwa orang Bali dalam mengadopsi budaya modern tampaknya masih tetap berpegang kepada ikatan tradisi dan sistem nilai yang dimilikinya. Fenomena paradok ini juga dikemukakan oleh Naisbitt dan Aburdene (1990:107) yang disebutnya sebagai sikap penolakan (countertrend) terhadap pengaruh kebudayaan global (budaya asing) sehingga timbul hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa sendiri.

Triguna (2004) mengatakan bahwa watak orang Bali telah berubah secara signifikan dalam dekade terakhir ini. Orang Bali tidak lagi diidentifikasi sebagai orang yang lugu, sabar, ramah, dan jujur sebagaimana pernah digambarkan oleh Baterson. Demikian pula orang Bali telah dipersepsikan oleh outsider sebagai orang yang temperamental, egoistik, sensitif, dan cenderung menjadi human ekonomikus. Perubahan karakter orang Bali disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah perubahan fisik yakni alih fungsi lahan yang setiap tahunnya berkisar sekitar 1000 ha. Budaya agraris yang semula menjadi landasan kehidupan budaya dan masyarakat Bali kini berubah menjadi budaya yang berorientasi kepada jasa dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Faktor eksternal bersumber dari kegiatan industri pariwisata telah menyebabkan terdinya materialisme, individualisme, komersialisme, komodifikasi, dan gejala profanisasi dalam kebudayaan Bali.

Multikulturalisme dalam Kebudayaan Bali

Dalam kebudayaan Bali terdapat nilai-nilai yang mengakui adanya perbedaan atau pluralitas. Nilai-nilai tersebut terefleksi dalam konsep rwa bhineda (dua hal yang berbeda atau oposisi biner). Perbedaan dalam kebudayaan Bali diakui karena adanya faktor desa (tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan/kondisi). Konsep desa, kala, dan patra ini sering dijadikan pembenar oleh masyarakat Bali mengenai adanya perbedaan adat-istiadat atau kebudayaan antara daerah yang satu dengan daerah lain di Bali.

Lebih lanjut, dalam kebudayaan Bali juga terdapat nilai-nilai toleransi dan persamaan yang didasarkan atas konsep Tat twam asi (dia adalah kamu). Dengan konsep Tat Twam Asi masyarakat Bali toleran kepada orang lain karena mereka beranggapan bahwa orang lain juga sama dengan dirinya. Fenomena ini mencerminkan tingginya toleransi dalam masyarakat Bali. Hal ini diperkuat lagi

dengan adanya konsep Tri Kaya Parisudha yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar.

Dalam aspek keseimbangan dan harmonisasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan hubungannya dengan lingkungan fisik orang Bali mengenal konsep Tri Hita Karana . Tri Hita Karana secara arfiah artinya adalah tiga faktor yang menyebabkan kesejahteraan yaitu hubungan yang harmonis dan seimbang dengan Tuhan (parhyangan), hubungan yang harmonis dan seimbang dengan sesama manusia (pawongan), dan hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan alam sekitar (palemahan). Hubungan sesama manusia dalam masyarakat Bali dikenal pula dengan konsep nyama braya . Nyama adalah kerabat dekat, dan braya adalah kerabat jauh. Sebagaimana diketahui bahwa Bali terdapat kantong-kantong hunian masyarakat Islam seperti di desa Pegayaman (Buleleng), Pamogan, Kapaon dan Serangan (Denpasar). Kelompok masyarakat Muslim tersebut memiliki sejarah yang erat dengan raja-raja atau para penguasa Bali di masa lalu, sehingga mereka sering disebut dengan istilah " nyama selam " atau saudara Islam/muslim .

Selain masyarakat Islam, di Bali juga banyak bermukim orang-orang Cina bahkan mereka telah menyatu dengan masyarakat dan kebudayaan Bali. Hubungan kebudayaan Bali dengan Cina dapat dikatakan telah berlangsung lama. Berbagai komponen budaya Cina telah menyatu atau diadopsi dalam kebudayaan Bali antara lain: pemanfaatan uang kepeng (uang Cina) sebagai alat transaksi dan kebutuhan upacara di Bali, dan beberapa jenis kesenian (seni ukir dan tari/baris Cina)(Ardana 1983: 4; Wirata 2000; Pringle 2004;).

Pengaruh Kebudayaan Cina di Bali

Masyarakat Cina telah lama tinggal dan hidup di Bali. Masyarakat Cina di Bali sebagaimana lazimnya komunitas Cina di Indonesia mereka tinggal di daerah perkotaan dan di Pedesaan. Menurut Visanty (1975: 346) orang Cina di Indonesia umumnya berasal dari dua provinsi yaitu Fukien dan Kwangtung. Lebih lanjut dikatakan bahawa ada empat bahasa Cina di Indonesia yaitu Hokkien, Teo-Chiu, Hakka, dan Kanton. Masyarakat Cina yang tinggal diperkotaan perilakunya berbeda dengan mereka yang tinggal dipedesaan. Orang Cina yang tinggal diperkotaan umumnya kurang bergaul dengan masyarakat lokal, namun mereka yang tinggal dipedesaan telah menyatu dengan masyarakat Bali.

Sampai saat ini belum ada data yang pasti kapan sesungguhnya awal hubungan Bali dengan Cina. Dalam berita Cina disebutkan nama Po-li yang mengirim utusan ke Cina pada awal abad ke 6 masehi. Apakah Po-li identik dengan Bali atau tempat lain di Indonesia masih belum jelas (Coedes 1968: 53). Kajian tentang mata uang terutama keberadaan uang kepeng Cina di Bali menunjukkan bahwa uang kepeng dari zaman Tang (abad 7-9 Masehi) telah ditemukan di Bali (Pringle 2004: 10). Uang kepeng sebagai barang yang mudah dibawa dan bertahan cukup lama sulit dijadikan pedoman untuk mengetahui awal kontak atau hubungan Bali dengan Cina. Namun demikian, fungsi uang kepeng Cina sebagai alat transaksi yang syah di Bali berlanjut pada masa kolonial, bahkan samapai kinipun uang kepeng masih dipakai sebagai pelengkap atau sarana pada upacara agama Hindu di Bali (Ardana 1983: 4; Pringle 2004). Perlu dicatat bahwa beberapa waktu yang Badan Pelestarian Budaya Bali telah memproduksi uang kepeng yang cukup banyak untuk kelengkapan sarana upacara di Bali.

Selain mata uang kepeng, unsur budaya Cina juga berpengaruh dalam seni di Bali. Keberadaan baris Cina di desa Sanur, Denpasar dapat dikatakan sebagai satu-satunya seni tari dengan kostum yang unik, dan diduga kuat mendapat pengaruh budaya Cina di Bali (Ardana 1983: 4). Demikian pula halnya dengan seni barong diduga mendapat pengaruh kesenian Cina. Pengaruh budaya Cina juga dapat dilihat dalam arsitektur dan seni ukir Bali. Bangunan dengan atap bertingkat yang lazim di Bali dikenal dengan nama Meru diperkirakan mendapat pengaruh arsitektur Cina. Seni ukir dengan pola sulur atau tumbuhan dengan batang yang merambat disebut patra Cina juga dianggap sebagai pengaruh budaya Cina.

Dalam konteks keagamaan, perlu juga disebutkan bahwa pada beberapa pura besar (Sad kahyangan) di Bali seperti pura Besakih dan pura Batur terdapat sebuah tempat pemujaan yang disebut Palinggih Ratu Subandar . Palinggih Ratu Subandar biasanya didominasi oleh warna merah dan kuning seperti lazimnya bangunan wihara/kelenteng, dan pemujaan pada bangunan suci tersebut difokuskan untuk memuja manifestasi Tuhan dalam aspek perdagangan atau kemakmuran.

Integrasi Masyarakat Cina di Bali

Selain diperkotaan, komunitas Cina juga tersebar di daerah pedesaan di Bali antara lain di Kintamani, Baturiti, Marga, Pupuan, Petang, Carangsari, Sukawati, Blahbatuh, dan Menanga. Mereka umumnya bermukim di dekat pasar tradisional atau pusat perdagangan, dan profesi sebagai pedagang atau petani. Studi kasus terhadap komunitas Cina di desa Carangsari, Badung oleh Ketut wirata (2000) menunjukkan bahwa mereka memiliki integritas yang tinggi dengan masyarakat Bali. Integritas ini disebabkan oleh adanya kesamaan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam agama Hindu dan Budha. Toleransi yang terdapat dalam ajaran agama Hindu (Tat Twan Asi, Tri Hita Karana, menyama braya) dan nilai-nilai yang sama dalam agama Budha tampaknya telah mendorong orang Bali dan komunitas Cina untuk dapat berintegrasi dengan baik. Kesamaan kultural ini menjadi modal penting sebagai landasan integrasi masyarakat Cina di pedesaan Bali. Agama Hindu dan Budha sejak dahullu dianggap satu seperti yang disebut oleh Mpu Tantular dalam karyanya yang berjudul Sutasoma dengan ungkapan yang sangat terkenal yaitu " Bhineka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa ". (Agama Siwa (Hindu) dan Budha pada hakikatnya sama). Hal ini juga terlihat dalam tradisi agama Hindu di Bali bahwa setiap penyelenggaraan upacara besar senantiasa dipimpin (dipuput) setidaknya dua pendeta yaitu pendeta Siwa (Hindu) dan Budha.

Selain kesamaan kultural dan agama, masyarakat Cina di pedesaan di Bali juga melakukan integritas struktural. Kenyataan masyarakat Cina di desa Carangsari, Badung menunjukkan bahwa mereka ikut menjadi makrama desa adat . Komunitas Cina di desa tersebut menjadi anggota desa adat dengan segala hak dan kewajibannya seperti rekan-rekannya dari komunitas Bali. Masyarakat Cina memasuki pranata-pranata sosial yang ada di desa Carangsari. Sebagai anggota karma desa masyarakat Cina di desa Carangsari ikut gotong royong (ngayah) di pura kahyangan tiga (tiga pura utama di setiap desa adat di Bali yaitu Pura Puseh, Desa dan Dalem) di desa tersebut, sehingga mereka juga mendapat hak yaitu tanah ulayat desa untuk tempat pemukiman mereka. Bahkan mereka semuanya memeluk agama Hindu.

Komunitas Cina di desa Carangsari menunjukkan ke-Bali-annya dengan menggunakan nama Bali seperti sebutan Putu, Made, Nyoman, dan Ketut. Fenomena ini juga terjadi pada komunitas Cina di tempat lain di Bali. Penggunaan bahasa Bali di kalangan komunitas Cina di Bali dapat dikatakan menambah ke-Bali-an mereka. Di samping itu, masyarakat Bali juga mengadopsi bahasa Cina dalam komunikasi sehari-harinya.

Selain menjadi karma desa atau memasuki pranata-pranata sosial di Bali, perkawinan antar etnis Cina dan Bali dapat memperkuat integritas kedua kelompok masyarakat tersebut. Keturunan dari hasil perkawinan ini akan dapat memperkuat integritas antara komunitas Cina dan masyarakat Bali.

Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal

Perubahan kebudayaan merupakan fenomena yang normal dan wajar. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa suatu kebudayaan telah mampu mengadopsi dan mengadaptasi kebudayaan asing/luar menjadi bagiannya tanpa kehilangan jati diri. Dalam interaksi tersebut kebudayaan etnik mengalami proses perubahan dan keberlanjutan (change and continuity). Unsur-unsur kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan zaman tampaknya ditinggalkan, dan digantikan dengan unsur-unsur yang baru.

Kesamaan nilai-nilai dalam agama dan spiritualitas mengenai multikulturalisme yang terdapat dalam berbagai etnik/komunitas di Indonesia tampaknya dapat digunakan sebagai alat untuk menjalin integritas sosial di antar kelompok etnik tersebut seperti halnya integritas antara orang Cina dan masyarakat Bali di pedesaan. Jati diri otentik adalah bersifat spiritual dan murni, sedangkan jati diri artifisial saat ini adalah materialisme akibat dari pengaruh budaya global dan hedonisme (Agustian 2004:2). Keyakinan akan adanya eksistensi Tuhan Yang Maha Esa akan memperkuat jati diri dan kepercayaan diri (Agustian 2004: 3). Dalam dunia modern, menurut Peter L. Berger (Nashir 1999:41) agama adalah canopy suci untuk menghadapi kekacauan (chaos) (the sacred canopy of chaos). Agama ibarat langit suci yang teduh dan melindungi kehidupan. Masyarakat harus kembali kepada basic value atau basic principle yang merupakan nilai-nilai dasar dalam kehidupan. Nilai-nilai dasar itu bersumber pada agama dan falsafah negara kita yakni Pancasila. Kearifan lokal yang terkait dengan nilai-nilai pluralitas budaya atau multikulturalisme dalam masyarakat perlu kiranya

direvitalisasi untuk membentengi diri dari gejala disintegrasi bangsa. Berbagai konsep dalam kebudayaan Bali seperti Rwa Bhineka, Tat Twam Asi, tri hita karana, dan nyama braya dalam kebudayaan Bali perlu dipahami sehingga dapat dipakai landasan untuk hidup saling berdampikan dengan etnik lain, khususnya etnik Cina. Kearifan-kearifan lokal tersebut di atas yang mengedepankan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan alam perlu disosialisasikan dan diejawantakan dalam kehidupan riil.

Di masyarakat kita kini muncul berbagai penyakit keterasingan (alienasi) antara lain. Alienasi ekologis, manusia secara mudah merusak alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan penuh kerakusan dan tanpa menghiraukan kelangsungan hidup di masa depan bagi semua orang. Muncul pula alienasi etologis, bahwa manusia kini mengingkari hakikat dirinya, hanya karena memperebutkan materi dan mobilitas kehidupan. Alienasi masyarakat, menunjukkan keretakan dan kerusakan dalam hubungan antarmanusia dan antarkelompok, sehingga lahir disintegrasi sosial. Selain itu, muncul pula alienasi kesadaran, yang ditandai oleh hilangnya keseimbangan kemanusiaan karena meletakkan rasio atau akal pikiran sebagai satu-satunya penentu kehidupan, yang menapikan rasa dan akal budi (Nashir 199: 6).

Berbagai keterasingan tersebut di atas sesungguhnya bertentangan dengan ajaran-ajaran atau kearifan lokal yang kita kenal selama ini baik di tingkat nasional maupun lokal. Di tingkat nasional kita mengenal istilah gotong royong, tenggang rasa (tepa salira), dan musyawarah mufakat. Pada tataran lokal kita mengenal bermacam-macam konsep yang maknanya sama. Noronga' uchu gawoni, noro' uchu geo, alisi tafa daya-daya, hulu ta farwolo-wolo (berat sam dipikul, ringan sama dijinjing) kata orang Nias. Sigilik seguluk selunglung sebayantaka (susah senang kita harus sama-sama) kata orang Bali (Imawan 2004: 1).

Secara sadar dan terencana perlu kiranya dikembangkan konsep sadar budaya, termasuk revitalisasi kearifan lokal tersebut. Selain itu, penggalian atau penemuan kembali kearifan-kearifan lokal dalam menumbuhkan budaya multikultural di antara berbagai etnik perlu terus dilakukan dalam membentengi diri menghadapi gelombang pengaruh budaya global. Upaya merevitalisasi kearifan lokal tampaknya tidak mudah dilakukan tanpa adanya kemauan politik (good will) dari pemerintah (Astra 2004: 13).

Pemberdayaan lembaga pendidikan, dan pendidikan formal maupun non formal perlu ditingkatkan untuk menggali dan mengembangkan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebudayaan. Melalui pendidikan diharapkan pemahaman generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan terhadap kearifan budaya lokal akan semakin meningkat yang pada gilirannya menimbulkan pemahaman terhadap jati diri. Penerapan kurikulum muatan lokal kiranya dapat memberikan peluang untuk menjadikan kearifan lokal sebagai mata ajar. Dengan upaya ini diyakini kearifan lokal mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Penutup

Pemahaman tentang kesamaan nilai-nilai budaya di antara kelompok-kelompok etnik menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan multikulturalisme di Indonesia. Sikap toleransi dan saling menghormati antara kelompok etnik yang satu dengan yang lain merupakan dasar yang sangat penting untuk mewujudkan gagasan tersebut. Nilai-nilai dasar yang bersumber kepada agama serta kearifan lokal merupakan benteng untuk memperkuat jati diri dalam menghadapi arus budaya global yang cenderung bersifat sekuler dan materialistis.

Dukungan politik dan kemauan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya menggali, menemukan kembali, dan revitalisasi kearifan lokal agar selaras dengan pembangunan jati diri bangsa.

Era globalisasi yang dicirikan oleh perpindahan orang (ethnoscape), pengaruh teknologi (technoscape), pengaruh media informasi (mediascape), aliran uang dari negara kaya ke negara miskin (financescape), dan pengaruh ideology seperti HAM dan demokrasi (ideoscape) (Appadurai 1993:296) tidak dapat dihindari terhadap kebudayaan Bali dan etnik lain di Indonesia. Sentuhan budaya global ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau kehilangan orientasi (disorientasi) dan dislokasi hampir pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Konflik muncul dimana-mana, kepatuhan hukum semakin menurun, kesantunan sosial mulai diabaikan. Masyarakat cenderung bersifat sekuler dan komersial, serta uang dijadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan.

GloBalisasi telah menimbulkan pergulatan antara nilai-nilai budaya lokal dan global menjadi semakin tinggi intensitasnya. Sistem nilai budaya lokal yang selama ini digunakan sebagai acuan oleh masyarakat tidak jarang mengalami perubahan karena pengaruh nilai-nilai budaya global, terutama dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin mempercepat proses perubahan tersebut. Proses gloBalisasi juga telah merambah wilayah kehidupan agama yang seraba sakaral menjadi sekuler, yang dapat menimbulkan ketegangan bagi umat beragama. Nilai-nilai yang mapan selama ini telah mengalami perubahan yang pada gilirannya menimbulkan keresahan psikologis dan krisis identitas di banyak kalangan masyarakat. Namun di sisi lain terjadi paradoks bahwa ekspansi budaya global justru menyebabkan meningkatnya kesadaran terhadap budaya lokal dan regional (Nashir 1999: 176; Azra 2002: 15).

12 Desember 2007

**Catatan Penguhan Guru Besar di Unibraw Malang
Soroti Birokrasi Berwawasan Kearifan Budaya Lokal**

Prof Dr Agus Suryono SU guru besar dalam ilmu administrasi pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dikukuhkan. Bagaimana pandangan sang guru besar, berikut catatannya.

SELAMA lebih dari tiga dasawarsa pembangunan negara Indonesia menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan (economic overtone) dan mengabaikan perhatian pada aspek-aspek budaya kehidupan bangsa.

"Model pembangunan semacam itu bukan hanya telah menghalalkan berbagai bentuk ketimpangan sosial, tetapi juga menimbulkan akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial, erosi-erosi ikatan kekeluargaan dan kekerabatan, serta meluasnya dekadensi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

Demikian Prof Dr Agus Suryono SU dalam pidato penguhan guru besar dalam bidang Ilmu Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw yang berjudul "Birokrasi dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Kearifan Budaya Lokal". Prof Agus Suryono dikukuhkan sebagai guru besar di hadapan Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya, di Gedung Widyaloka, Senin (10/12) lalu.

Pilihan pada pendekatan ekonometrik itu bahkan telah membuat masyarakat menjadi sangat tergantung pada birokrasi-birokrasi sentralistik yang memiliki daya absorpsi sumberdaya sangat besar, namun kemampuan dan kepekaannya sangat rendah untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan lokal dan secara sistematis telah mematikan pula inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Konsekuensi pendekatan tersebut, lanjutnya, adalah tergerusnya nilai-nilai budaya bangsa dalam skema pembangunan yang telah dirancang dan dibakukan dari atas. Masyarakat harus tunduk pada rezim nilai-nilai pembangunan yang seragam dan monopolistik. Itulah sebabnya, praktek-praktek pembangunan juga seragam di berbagai entitas masyarakat dan daerah, walaupun secara kultural memiliki perbedaan yang sangat nyata.

Oleh sebab itu dapat diduga betapa penyeragaman nilai dan praktek-praktek pembangunan yang ditanamkan selama ini justru menciptakan distorsi dan disintegrasi yang luar biasa dalam masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat bangsa ini merasa tercerabut dari akar budayanya dan menghamba pada dominasi nilai-nilai budaya asing (global) yang dikemas dalam paket-paket halus pembangunan yang sebenarnya sangat sulit dimengerti dan dipahami. Pembangunan berwawasan kearifan budaya (lokal) menawarkan pilihan model pembangunan yang mengedepankan penguatan harkat dan martabat manusia dalam proses-proses pembangunan yang tiada henti-hentinya mencari alternatif munculnya peradaban baru (new civilization) yang lebih membebaskan, lebih mencerahkan, lebih adil, dan lebih manusiawi. Dengan kata lain, pembangunan berwawasan kearifan budaya (lokal) diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia; bukan semata-mata hanya menghasilkan tercapainya kecukupan dan kelimpahan material, melainkan juga harus mampu menghadirkan penguatan nilai-nilai fundamental manusia itu sendiri. Selain itu, juga mengandung makna bagaimana caranya mengemas atau merumuskan kebijakan pembangunan lokal menjadi bernilai global dengan melibatkan elite dan masyarakat lokal setempat. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman birokrasi yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai penyakit birokrasi atau patologi birokrasi (bureaucratic pathology). Masalah ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat

awam dan para akademisi, tetapi juga oleh para birokrat sendiri. Para kritisi mengkhawatirkan, birokrasi cenderung menjadikan dirinya sendiri sebagai tujuan. Birokrasi menjadi majikan, dan bukan pelayan, sehingga warga masyarakat bukannya menikmati keuntungan-keuntungan dari efisiensi yang lebih besar, melainkan menjadi terjerat dalam prosedur-prosedur birokrasi tanpa senyum.

Birokrasi dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal adalah sebuah keniscayaan dari sesuatu yang mungkin. Kearifan budaya lokal bukan sejarah atau dongeng, tetapi merupakan warisan ajaran budi pekerti luhur (budaya adhi luhung) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, apabila wawasan kearifan budaya lokal dianggap sebagai sebuah pilihan rasional (rational choice) dalam pembangunan, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan. "Antara lain: Pertama, paradigma pembangunan yang berwawasan kearifan budaya lokal harus dapat bekerja atas dasar logika ekologi manusia dan dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peran penting untuk menentukan tujuan-tujuan mereka sendiri dengan mengelola potensi-potensi sumber daya yang diperlukan bagi kepentingan bersama," tutur Prof Agus Suryono.

Kedua, tujuan pembangunan yang berwawasan kearifan budaya lokal adalah untuk mencapai realisasi potensi-potensi kemanusiaan yang utuh; Ketiga, paradigma pembangunan yang berwawasan kearifan budaya lokal harus dapat melengkapi struktur-struktur formal dengan teknologi organisasional yang lebih bersifat adaptif dan dapat memberikan nilai tambah pada inisiatif perencanaan pembangunan daerah.

Keempat, paradigma pembangunan yang berwawasan kearifan budaya lokal harus dapat menempatkan sistem produksi di bawah subordinasi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan dilengkapi dengan dukungan sumberdaya intelektual yang profesional, sumberdaya sosial yang memadai, dan sumberdaya kearifan lokal yang bijak.

Kelima, paradigma pembangunan yang berwawasan kearifan budaya lokal mengakui arti pentingnya produksi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus memberikan tempat yang sama bagi pentingnya nilai-nilai kualitas hidup yang lebih luas seperti nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kesetiakawanan sosial.

"Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, paradigma birokrasi yang berwawasan kearifan budaya lokal hendaknya lebih memperhatikan adanya perubahan-perubahan dalam hal: sistem organisasi dan tata kerja pegawai; sikap daya cipta/kreativitas; sistem pelaksanaan; sikap terhadap masalah dan munculnya ide-ide baru; manajemen kerja; orientasi pembangunan; metode pengambilan keputusan; daripada hanya berpolemik dengan slogan kaya fungsi miskin struktur," kata Prof Agus Suryono. (so)

9.3. Petra Karetji (BaKTI):

Dikirim melalui email tanggal 17 Maret 2008, jam 23:10:23 +0800:

Subject: Fwd: Indigenous people can offer climate change solutions: Conservation Group

----- Forwarded message -----

From: JoyoNews2 <joyone...@gmail.com>

Date: Mon, Mar 17, 2008 at 3:28 PM

Subject: Indigenous people can offer climate change solutions: Conservation Group

To: joyonews@googlegroups.com

Indigenous people can offer climate change solutions: IUCN

GENEVA, March 14 (AFP) -- Honduras' Quezungal farmers have an age-old trick to protect their crops from hurricanes -- planting them under trees whose roots would anchor the soil, thereby holding the crops steady.

Not just these farmers, but many indigenous people around the world are sitting on a treasure trove of traditional knowledge that could be mined as the world seeks adaptation strategies to deal with climate change, the International Union for Conservation of Nature said on Monday.

"Indigenous people have a lot of techniques to adapting to climate change that we can learn from," the group's chief scientist Jeffrey McNeely told journalists in Geneva.

These are strategies including crop diversification in order to minimise the risk of harvest failure, or change in food storage methods including drying or smoking foods according to climate variability.

"They are not just victims, because of their long dependance on nature they've developed strategies to cope with climate change and extreme natural events which still have as much relevance today as they did hundreds of years ago," said IUCN Director General Julia Marton-Lefevre.

However, these populations are also the most vulnerable to climate change, and are seeing effects of climatic changes rendering unreliable the knowledge they have accumulated about the world.

For example, Indonesia's East Kalimantan hunter-gatherer Punan people look out for a full moon when planning to plant fruit trees, as it increases the chances of a yield of large fruits.

On the other hand, the day when the moon is shaped like a letter 'c' in reverse is the day to avoid cultivating fruit trees and rice.

"But with the changes of climate these lunar signals may no longer coincide with the favourable times for these activities and the Punan may be misled in taking their decisions," said the IUCN in its report.

Urging more involvement of indigenous people in the climate change dialogue, McNeely said: "The people who are hardly being mentioned are the ones most likely to be heavily impacted by climate change."

In December, a group of indigenous people protested outside a UN climate change conference in Bali, Indonesia, saying that they have been excluded from key talks on the issue.

Marcial Arias, one of Panama's Kuna people, said then of the conference: "There are no name places for indigenous people, there are no seats for indigenous people. They want us to beg on our knees to be given the floor, but we have the right to participate."

9.4. Petra Karetji (BaKTI):

Dikirim melalui email tanggal 27 Maret 2008, jam 10:50:21 +0800:

Temans:

Saya baru upload satu file terkait dengan indigenous knowledge mungkin berguna sebagai salah satu referensi.

File tersebut dapat diakses pada link berikut:

http://groups.google.com/group/PSKTI_UKSW/web/IndiKnow-e.pdf

Salam,

Petra

9.5. Roy Siahainenia (PSKTI):

Dikirim melalui email tanggal 29 Maret 2008, jam 11:12 AM:

Om Theo, diskusi kita kemaren menarik karena ada sejumlah pengalaman yang muncul dan bisa menjadi acuan. Setelah saya renungkan ada beberapa masukan yang mungkin berguna bagi Om Theo.

1. Mengenai indigenous knowledge sekarang ini sudah ada lembaga yang secara khusus mengembangkannya terutama di sektor perikanan, seperti The Locally – Manged Marine Area Network (LMMA). Kegiatan sangat menarik dan mungkin bisa memberikan inspirasi om Theo untuk mengeksplor lebih jauh terhadap masalah yang om akan teliti.

2. Berkaitan dengan Papua, sebenarnya ada banyak studi yang menarik dapat kita gunakan, seperti yang dilakukan oleh Elsam Papua. Juga ada satu disertasi, kalau tidak salah oleh Ngdisah (2003) tentang Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua yang lebih menyoroti masalah PT Freeport dan hubungan dengan masyarakat adat Amugme di Mimika. Yang menarik dari hasil penelitiannya bahwa ada semacam upaya yang dilakukan masyarakat adat untuk memproleh kembali status tanah adat (ulayat). Meskipun PT Freeport (kapitalisme) sudah memberikan kompensasi sosial kepada Pemerintah Pusat tetapi hampir sebagian besar dananya diperuntukan bagi kepentingan pusat. Karenanya Om Ten benar harus dilihat juga relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

3. Selain itu ada satu hal yang juga penting terkait dengan pemberian otonomi khusus bagi Papua. Perdebatan kita kemaren tentang Musrenbang dan PPK secara umum nampaknya menjadi tidak relevan. Mengapa? Karena yang sekarang dikembangkan di Papua adalah persoalan pengembangan ekonomi kampung (mungkin bisa tanya lebih jauh dengan Petra). Program ini menadopsi pelaksanaan PPK yang dianggap mempunyai praktik-praktik yang baik (good practice). Saya kira dibalik program ini sebenarnya ingin mendorong upaya-upaya untuk mengembangkan Indigenous Knowledge (perlu dianalisis lebih lanjut).

4. Sekarang ini ada satu mahasiswa FISIPOL yang meneliti secara khusus bagaimana relasi sosial yang muncul akibat adanya gerakan sosial. Sayangnya ia belum menyelesaikan penelitiannya. Dalam bimbingan, saya menyarankan beberapa hal yang menjadi fokus: (1) bagaimana interaksi sosial yang muncul akibat diterapkannya program ekonomi kampung, (2) apa respon masyarakat adat terhadap keberadaan program tersebut, tentunya di dalamnya tentang ndegenous Knowledge, dan (3) hasil-hasil seperti apa yang sudah dirasakan masyarakat. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan konsep musrenbang yang hanya lebih memfokuskan pada perencanaan tidak pada pelaksanaan dan monev dari hasil pembangunan itu sendiri.

5. mengenai usulan tentang posisi yang saya tanyakan kemaren sebenarnya tidak pada kajian politik semata. Tetapi posisi yang dimaksud adalah apa yang om Theo ingin teliti? Hal ini penting karena dari hasil eksplorasi yang dilakukan om Theo dan juga masukan-masukan dalam diskusi kemaren, posisi om Theo kemudian dimana? Ini yang saya maksudkan.

Roy

9.6. Geritz Febry Bataragoa (Scientiarum):

Dikirim melalui email tanggal 29 Maret 2008, jam 05:35:49 -0700:

Salam semuanya,

Waktu diskusi kemarin ada berkembang pendapat yang tidak percaya penjangkaran aspirasi dengan Musrenbang atau apapun itu. Karena biasanya Top-Down. Namun saya berpendapat bahwa ada hal penting bahwa ada peluang yang bisa diambil disini.

Peluang Apa ?

Dalam pelaksanaan musrenbang di Indonesia memang biasa terjadi Top-Down. Namun hal ini bisa di atasi (menurut saya), dengan melakukan pencerdasan pada masyarakat oleh kaum kaum Intelektual. Dan ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Selain itu ini bukan pekerjaan satu dua hari dan satu dua orang, oleh karena itu harus dikawal dengan baik dan penuh kesungguhan.

Strategi bagaimana :

1. Ada keinginan baik dari kaum intelektual (bisa dimulai dari anggota Milis hehehe)

2. Hal yang harus di perjuangkan pertama kali adalah Perda Partisipasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Artinya ada jaminan hukum.

3. Yah Pemberdayaan Masyarakat, Pencerdasan Masyarakat, dll. Mungkin model bisa belajar dari Filipina. (bisa dengar cerita Kak Theo dan Pak Nick)

Namun ada hal yang menggelitik saya, apakah ada kesadaran dari kaum intelektual khususnya dari UKSW ?

Saya teringat dari teori Habitus Pierre Bourdieu, dalam konteks ini. Kritiknya kira-kira seperti ini: Sebenarnya kaum intelektual sadar bahwa harus terjun melihat berbagai fenomena dalam masyarakat, namun mereka tidak terjun. Kebiasaan ini terus dipelihara. Dan akhirnya tetap tidak terjun. Jadi Habitus terjadi bukan secara tidak disadari, namun ia terjadi justru dalam keadaan sadar. Mungkin saya salah, tapi kita Punya Om Roy yang ahli Bourdieu yang bisa membenarkan.

Best Regards,

-Geritz-

9.7. Roy Siahainenina (PSKTI):

Dikirim melalui email tanggal 30 maret 2008:

Geritz, dalam kasus Musrenbang atau apapun yang kita katakan sangat tergantung pada sudut pandang. Kalau dari segi kebijakan publik yang menjadi penekanan om Danny kemarin dalam diskusi kita menjadi benar, karena Musrenbang dilakukan hanya untuk memperoleh legitimasi dari publik dimana aktor-aktor masyarakat sengaja dilibatkan tetapi penentuannya tetap aktor-aktor politik (eksekutif dan DPRD). Namun kalau kita sebagai intelektual tidak bisa hanya melihat dari satu segi saja, seperti interpretasi Geritz tentang konsep

habitus dari Bourdieu, sayangnya tidak terungkap kemarin didiskusikan ya, karena tidak diberi kesempatan.

Bourdieu memang menarik, dan kalau kita mau membahas lebih lanjut sebenarnya ada satu konsep yang disebut ruang sosial atau dalam konsepnya Habermas: ruang publik. Di dalam ruang inilah kemudian tercipta suatu "interaksi kritis" yaitu saling terkait dan saling mempengaruhi yaitu: aktor dari rakyat di satu sisi dan aktor dari negara di sisi yang lain untuk mendiskusikan satu proses pembangunan yang kompleks guna menghasilkan perencanaan pembangunan. Ruang ini bisa dianalogikan sebagai Musrenbang.

Bourdieu tidak mempersoalkan hasilnya seperti apa, tetapi apabila ruang ini tersedia, maka ada satu sistem disposisi, yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang kemudian berfungsi sebagai basis generatif bagi praktek-praktek pembangunan yang terstruktur dan terpadu secara objektif, yang kemudian dikonsepsikan sebagai habitus. Di dalam ruang tersebut, juga terjadi jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individu yang kemudian dikonsepsikan dengan ranah (field). Ranah mengkondisikan habitus, sementara habitus membentuk ranah sebagai sesuatu yang bermakna. Namun kedua konsep perlu ditopang dengan sejumlah ide lain, seperti yang Geritz sebutkan sebagai strategi, dimana maksud dari strategi itu adalah untuk membangun kekuasaan simbolik, strategi dan perebutan (kekuasaan simbolik dan material), beserta beragam jenis modal (modal ekonomis, budaya dan simbolik itu sendiri).

Dengan kata lain, pertanyaan Musrenbang tidaklah membawa manfaat nampaknya masih perlu kita pertanyakan. Karenanya Geritz menjadi benar bahwa persoalan bukan pada Musrenbang itu sendiri, sebab Musrenbang hanya arena untuk melakukan interaksi kritis. Interaksi ini bisa dinamis dan saling menguntungkan apabila aktor dari masyarakat dipersiapkan dengan baik terutama oleh kaum intelektualnya.

Pengalaman saya di Timor Timur, memperlihatkan hal itu, dimana aktor-aktor masyarakat yang ada di berbagai tingkat (RT/RW, Dusun, Desa, hingga ke Kecamatan). Rumusan kemudian disusun bersama memunculkan suatu program pembangunan yang kami sebut pembangunan daerah terpencil dan masuknya tidak hanya diperuntukkan bagi perencanaan kabupaten lewat APBD, tetapi menjadi perencanaan propinsi yang kemudian diusulkan ke Mendagri sehingga Kecamatan Atauro memperoleh status sebagai daerah tertinggal.

Pengalaman di Salatiga sendiri yang pernah saya lakukan dengan menyadari bahwa masalah kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai perencanaan kota melalui APBD tetapi bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan seperti P2KP, kelompok-kelompok pengusaha, LSM dan perguruan tinggi dilibatkan. Hasilnya adalah sebuah rumusan tentang pentingnya mengembangkan program percepatan kemiskinan melalui kegiatan membantu pembangunan rumah bagi KK miskin (Rp 1,7 Milyar) dimana dananya sebagian dari APBD (karena kota Salatiga APBD kecil), P2KP, LSM dan kontribusi para pengusaha kota Salatiga.

Pengalaman ini sebenarnya hanya ingin memaknai bagaimana ruang sosial atau ruang publik tersebut sebagai wadah interaksi semua pihak yang terlibat dalam

pembangunan. Saya kira om Fer lagi melihat peraturan tentang Musrenbang, ini mungkin bisa menjadi masukan.

Sementara begitu dulu untuk menjawab pertanyaan Geritz.

Thanks.

Roy.

9.8. Dharma Palekahelu (PSKTI):

Dikirim melalui email tanggal 31 Maret 2008, jam 09:05 AM:

Saya ingin klarifikasi soal Musrenbang. Sebenarnya pada diskusi kemarin, saya ingin mendudukan peran dan fungsi Musrenbang dalam hubungannya dengan topik yang dibawa oleh TL. Saya setuju bahwa Kebijakan Lokal dan Pengetahuan Lokal perlu menjadi perhatian dan diperjuangkan dalam konteks pembangunan daerah. Persoalannya bagaimana masyarakat sadar dan mampu mengartikulasikan pengetahuan-pengetahuan lokal tersebut sehingga memiliki rasionalitas yang kuat saat memperjuangkan melalui forum Musrenbang. Saya sampai sekarang masih Pesimis (bukan menolak) forum Musrenbang menjadi wahana yang dapat mengakomodasi Kebijakan Lokal dan Pengetahuan Lokal dalam proram-program pembangunan. Kepentingan politik yang terkait dengan balas jasa saat pilkada (terutama berkaitan dengan dana kampanye), hemat saya semakin memperkuat arus intervensi kebijakan dari atas ke bawah. Apalagi di daerah-daerah miskin yang dana "Kue Pembangunan" nya hanya berharap dari pusat. Dalam konteks yang demikian, saya masih pesimis Musrenbang dapat diharapkan mendorong arus partisipasi dari bawah secara signifikan.

Dari kerangka pikir yang demikian, saya berpikir kita perlu mencari format atau wahana alternatif agar Kebijakan Lokal dan Pengetahuan Lokal yang ada dapat diakomodasi.

Sebagai orang kampus, yang diharapkan dapat membantu masyarakat, *pertama*, kita harus mulai dengan memahami Kebijakan dan Pengetahuan Lokal yang ada. **Ide** lagi, penelitian tentang hal ini menarik untuk kita kerjakan. Hal *kedua*, bangun rasionalitas yang kuat dari Kebijakan dan Pengetahuan Lokal tersebut dan sosialisasikan ke masyarakat tentang hal tersebut, sehingga terbangun kesadaran yang kokoh. Jika kesadaran tersebut telah terbangun hemat saya masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dengan DPRD maupun Pemerintah Daerah.

Bagaimana membangun kesadaran? Kita bisa bekerja dengan NGO atau Gereja-gereja lokal. *Ketiga*, membangun forum perjuangan Kebijakan dan Pengetahuan Lokal. Lewat project saya kira kita bisa mulai mengintrodusir sebuah forum reguler di tingkat daerah yang mengidentifikasi berbagai kebijakan dan pengetahuan lokal dalam hubungannya dengan pembangunan. Forum ini berfungsi untuk (1), menginventarisir kebijakan dan pengetahuan lokal yang ada, (2) mempertautkan secara langsung dengan program-program pembangunan yang ada (baik mendukung maupun tidak), (3) membangun kesadaran bersama dengan berbagai pemangku kepentingan (Masyarakat,

Tokoh Masyarakat, NGO, PT, DPRD, Pemda) tentang permasalahan ini, dan tentunya (4) menjadi Gerakan Perjuangan yang lebih mengena tetapi tidak konfrontatif. Kalau ini bisa berjalan dengan mulus, Perda dan apapun forum perencanaan pembangunan yang digunakan akan mudah dikawal.

Salam, sory talalu panjang.

DP

9.9. Petra Karetji (BaKTI):

Dikirim melalui email tanggal 31 Maret 2008, jam 09:56 AM:

Temans:

Saya sangat setuju dengan apa yang dilontarkan Bung Dharma. Sebenarnya kalau mau melihat MUSRENBANG sebagai salah satu strategi (yang dikemas sebagai kebijakan maupun di dalam struktur pelaksanaan pemerintahan) untuk membangun komunikasi antar pihak demi pembangunan satu daerah, keberadaan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses MUSRENBANG tersebut perlu dikaji lebih jauh, terutama sisi rasionalitas masing-masing dalam menyikapi dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Lalu disini bisa kita lihat apakah sebenarnya proses komunikasi dalam MUSRENBANG berjalan secara efektif atau tidak. Menurut hemat saya, permasalahannya bukan pada MUSRENBANGnya sendiri tetapi pra-musrenbang dalam proses-proses pengakuan dan verifikasi kebutuhan masyarakat oleh masyarakat bersama dengan pemerintah, sehingga MUSRENBANGnya sendiri merupakan proses konsolidasi pengetahuan kebutuhan pembangunan yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Di beberapa daerah (sebutlah Kabupaten Jeneponto) dimana sudah terjadi proses pengumpulan data kemiskinan berbasis masyarakat hingga pemetaan dan berbagai data dukungan lainnya (yang dilakukan ACCESS) data tersebut menjadi acuan utama pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan melaksanakan proses MUSRENBANG secara efektif. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan politik Bupati untuk dapat memenangkan pemilu, namun hal inipun merupakan indikator positif yang menunjukkan bagaimana politisi mulai "sadar konstituennya". Tapi dibalik semua ini adalah kekuatan data dan informasi masyarakat sehingga memiliki keyakinan diri yang cukup (Premis Wayor I) untuk membangun rasionalitas bersama dengan pemerintah mengenai apa yang dibutuhkan. Selama keyakinan tersebut masih lemah (berdasarkan penekanan bahwa masyarakat tidak mampu/tidak berdaya dsb.) maka pihak pemerintah tentunya akan mendominasi proses berdasarkan apa yang pihak pemerintah "rasakan" sebagai kebutuhan. Keterbatasan data dan informasi inilah yang ikut mendorong adanya pembangunan yang berbasis "ilham" bukan pengetahuan. Dalam kata lain, salah satu peran penting proses fasilitasi masyarakat (yang saya cantumkan sebagai pernyataan misi PFPM pada peta strateginya tempo hari) adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, kapasitas yang dibutuhkan masyarakat adalah untuk mengisi dan bahkan mendobrak paradigma pihak pemerintah yang sadar atau tidak, masih berlaku sebagai penguasa, dan bukan pelayan publik. Daya

dobrak ini bisa secara adat dengan menggunakan kekerasan, atau dengan mengisi dan mengubah rasionalitas pemerintah.

Dalam pertemuan antar kepala BAPPEDA Provinsi seKTI yang kita (SOFEI/Forum KTI) laksanakan bulan lalu di Ambon, menarik untuk menyimak pengakuan dan apa yang saya terjemahkan sebagai rasa penasaran para pelaku perencanaan pembangunan tersebut, yaitu bahwa proses2 perencanaan selama ini lebih sebagai ritualitas/formalitas belaka. Hal ini jauh dari ideal tetapi benturan yang semua hadapi adalah keterbatasan data dan informasi untuk melaksanakan proses perencanaan secara baik.

Kembali tantangan yang bisa dilontarkan kepada para kaum akademisi adalah sejauh mana kita menguasai data dan informasi lokal yang bermanfaat dan bermakna bagi masyarakat dalam mengisi pembangunan? Contoh kasus adalah kota Salatiga. Apakah berbagai perangkat data mengenai kota ini dimiliki dan dikelola secara efektif di UKSW sehingga selalu menjadi acuan pemerintah dan acungan masyarakat? (dan sekaligus memudahkan UKSW untuk mengkapitalisasikan modal intelektualnya?).

Salam,

PK